



# LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT V  
TAHUN 2023



INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

## PRAKATA

Laporan Kinerja Inspektorat V Itjen KKP Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja dan sebagai implementasi pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta administrasi lingkup Itjen, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta audit investigasi dan tindak lanjut pengaduan masyarakat di lingkungan KKP. Penjelasan lebih rinci mengenai pencapaian kinerja atas pelaksanaan tugas Inspektorat V tahun 2023 akan disajikan pada bagian pembahasan dalam laporan ini

Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban Inspektorat V kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas mandat yang diberikan dan sebagai pendorong peningkatan kinerja Inspektorat V Itjen KKP di masa mendatang.

Jakarta, 18 Januari 2024  
**Inspektur V Itjen KKP**



**Cipto Hadi Prayitno**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai bagian dari Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat V menjalankan mandat untuk melaksanakan pengawasan intern yang dapat memberikan nilai tambah terhadap pencapaian tujuan Itjen dan Kementerian dalam upaya memberikan keyakinan kepada pimpinan Itjen dan kementerian bahwa penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan telah berjalan secara efektif, efisien, andal, dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pengawasan intern dilaksanakan dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan terukur dengan mengacu kepada standar pengawasan yang berlaku.

Selain itu, Inspektorat V menerapkan praktik-praktik terbaik yang berkembang seiring dengan pembelajaran dari hasil evaluasi internal maupun dari organisasi lain (eksternal). Inspektorat V dalam pelaksanaan pengawasan mengedepankan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi yang memiliki risiko tinggi dan menjadi perhatian publik dan/atau pimpinan KKP.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan, program yang ditetapkan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Itjen tahun 2023, Inspektorat V melaksanakan “Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Dengan Tujuan Tertentu pada Pelaksana Pembangunan KP dan Pengawasan pada Unit Kerja Mitra Inspektorat V”. Keberhasilan Program ini diukur melalui pencapaian 3 Sasaran Strategis dengan 16 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari 16 IKU tersebut, sebanyak 11 capaian IKU melampaui target yang ditetapkan, sedangkan pencapaian atas 5 IKU lainnya sesuai dengan target yang ditetapkan. Dengan kondisi capaian ini, nilai kinerja organisasi Itjen yang ditunjukkan dengan Nilai rata-rata Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) mencapai 106,56% dimana nilai ini lebih rendah dari NPSS Itjen tahun 2022 sebesar 107,57%. Penurunan ini dikarenakan penurunan capaian tindak lanjut atas hasil pengawasan yang dipengaruhi oleh kurangnya komitmen unit kerja untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan.

Beberapa capaian kinerja Inspektorat V yang mengalami keberhasilan dalam mendukung kinerja Itjen dan KKP tahun 2023 antara lain: 1) Temuan materialitas oleh pengawas eksternal sebesar 0,00% dari total realisasi anggaran Itjen KKP; 2) Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) KKP mendapat Level 3 (Terdefinisi); 3) Sistem Akuntabilitas Kinerja KKP dapat dipertahankan dengan 81,89; dan 4) Nilai Integritas KKP mendapat nilai 80,32. Pencapaian yang baik tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kualitas pengendalian atas perkembangan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja yang dilaksanakan secara periodik.

Pencapaian kinerja program tersebut dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya anggaran sebesar Rp4.450.029.973 Rp4.035.020.000 atau 99,99% dari alokasi anggaran Rp4.450.229.000. Penggunaan sumber daya anggaran ini dapat dinilai

cukup efisien karena dengan *input* anggaran yang lebih kecil (99,99%) dapat dihasilkan kinerja yang melebihi target (NPSS: 106,56%). Dengan demikian, efisiensi anggaran yang dapat dihasilkan mencapai 0,01%. Efisiensi anggaran ini dapat dicapai oleh Inspektorat V sebagai hasil dari optimalisasi hari pengawasan dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan dan penerapan pengawasan berbasis resiko yang memungkinkan pengawasan Inspektorat V lebih tepat sasaran. Pencapaian kinerja program Itjen juga didukung oleh sumber daya manusia dengan jumlah 33 orang yang sebagian besar (> 90%) berpendidikan Diploma IV/S-1, dan S-2.

Pencapaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai kegiatan pengawasan dan berbagai upaya peningkatan kualitas pengawasan intern yang difokuskan kepada pengawasan akuntabilitas kinerja dan keuangan, penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa, pembangunan integritas, penerapan program anti korupsi, tindak lanjut rekomendasi atas temuan Itjen dan BPK, dan sistem pengendalian internal. Selain itu, Inspektorat V melaksanakan mandat dari pembentukan tim *adhoc* lingkup KKP antara lain: kelompok kerja peningkatan kualitas Laporan Keuangan, Unit Pengendalian Gratifikasi, Tim Penanganan Pengaduan SP4N-LAPOR, *Whistleblowing System*, dan Pembangunan Integritas KKP.

## DAFTAR ISI

PRAKATA .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	ix
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	1
C. Tugas dan Fungsi .....	2
D. Agenda Inspektorat V .....	3
E. Dasar Pengukuran Kinerja .....	4
F. Tujuan Pengukuran Kinerja .....	5
G. Ruang Lingkup .....	5
H. Waktu Pengukuran Kinerja .....	5
I. Metodologi Pengukuran Kinerja .....	5
J. Sistematika Laporan .....	5
<b>BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>6</b>
A. Rencana Strategis KKP dan Itjen KKP 2020 – 2024 .....	6
B. Rencana Kinerja Tahunan .....	8
C. Penetapan Kinerja Tahun 2023 .....	8
D. Program dan Kegiatan Pengawasan .....	10
<b>BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>12</b>
A. Pengelolaan Kinerja Inspektorat Jenderal .....	12
B. Capaian Kinerja .....	12
1. Sasaran Strategis ke-1 .....	15
IKU-1. Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK Mitra Inspektorat V .....	16
IKU-2. Level Maturitas SPIP Mitra Inspektorat V .....	16
IKU-3. <b>Persentase Unit Kerja yang dilakukan Penilaian                 Zona Integritas menuju WBK oleh TPI</b> .....	18
IKU-4. Nilai PM SAKIP Inspektorat V .....	18
IKU-5. Nilai Integritas KKP .....	19
IKU-6. Terkelolanya pelaporan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup KKP .....	21
2. Sasaran Strategis ke-2 .....	22
IKU-7. Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN .....	22
IKU-8. Tingkat Efektifitas Pengawasan PBJ .....	23
IKU-9. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Mitra Inspektorat V .....	24
IKU-10. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu KKP .....	25
IKU-11. Presentase Pengaduan Masyarakat yang Di Tindaklanjuti .....	26

IKU-12. Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat V .....	26
IKU-13. Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu .....	27
IKU-14. Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT .....	28
3. Sasaran Strategis ke-3 .....	29
IKU-15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja .....	29
IKU-16. Terkelolanya Anggaran Secara tertib dan Akuntabel.....	30
C. Analisis Pengelolaan Sumber Daya Anggaran .....	30
<b>BAB 4 PELAPORAN HASIL PENGAWASAN.....</b>	<b>35</b>
A. Pengawasan Mitra Inspektorat V .....	35
B. Pengawasan Pembangunan Integritas .....	38
C. Penanganan Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan .....	52
D. Pengawasan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan.....	55
<b>BAB 5 PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan.....	58
B. Permasalahan .....	60
C. Rencana Perbaikan .....	61

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Tujuan Itjen dan Indikator Tujuan.....	7
Tabel 2. Penetapan Kinerja Inspektorat V Itjen KKP TA 2023.....	8
Tabel 3. Rentang Penilaian Capaian Kinerja.....	12
Tabel 4. Capaian SS dan IKU Inspektorat V KKP Tahun 2023.....	13
Tabel 5. Perbandingan Capaian Nilai Temuan Materialitas Mitra Inspektorat Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024.....	16
Tabel 6. Perbandingan Capaian Level Maturitas SPIP Mitra Inspektorat V Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024.....	17
Tabel 7. Perbandingan Capaian Persentase Unit Kerja yang dilakukan Penilaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK oleh TPI Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024.....	18
Tabel 8. Perbandingan Capaian Nilai SAKIP Itjen KKP Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024.....	19
Tabel 9. Perbandingan Capaian Nilai Integritas KKP Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024.....	20
Tabel 10. Perbandingan pengelolaan pelaporan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024.....	22
Tabel 11. Perbandingan Capaian Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Itjen KKP Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024.....	23
Tabel 12. Perbandingan Capaian Tingkat Efektivitas Pengawasan PBJ Lingkup KKP Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024.....	24
Tabel 13. Perbandingan Capaian Kinerja Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat V Tahun 2023 dengan Capaian Tahun 2022 dan Target Tahun 2024.....	24
Tabel 14. Perbandingan Capaian Kinerja Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tujuan Tertentu lingkup KKP Tahun 2023 dengan Capaian Tahun 2022 dan Target Tahun 2024.....	25
Tabel 15. Perbandingan Capaian Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024.....	26
Tabel 16. Perbandingan Capaian Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat V Tahun 2023 dengan Capaian Tahun 2022 dan Target Tahun 2024.....	27
Tabel 17. Perbandingan Capaian Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Itjen KKP Tahun 2023 dengan Capaian Tahun 2022 dan Target Tahun 2024.....	28
Tabel 18. Perbandingan Capaian Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat V Tahun 2023 dengan Capaian Tahun 2022 dan Target Tahun 2024.....	29
Tabel 19. Perbandingan Capaian Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja Lingkup Inspektorat V Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024.....	29

Tabel 20	Perbandingan Capaian Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja Lingkup Inspektorat V Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024.....	30
Tabel 21	Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat V Itjen KKP TA 2023-2022.....	31
Tabel 22	Pagu dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Kinerja Inspektorat V Tahun 2023.....	32
Tabel 23	Efisiensi Anggaran Inspektorat V Tahun 2023 Per Jenis Capaian Kinerja.....	34
Tabel 24	Daftar 20 Unit Kerja yang Meningkatkan Kualitasnya dan diusulkan TPN	39
Tabel 25	Daftar 12 Unit Kerja yang belum dapat diusulkan TPN.....	40
Tabel 26	Hasil Pleno Penilaian Pembangunan ZI menuju WBK KKP Tahun 2023.....	41
Tabel 27	Ikhtisar Kegiatan Pengawasan Tim LK dan BMN Tahun 2023.....	52



## DAFTAR GAMBAR

	Hal
1. Struktur Pembagian Tugas Personil Inspektorat V Itjen KKP Tahun 2023	3
2. Nilai Rata-rata Capaian Kinerja Inspektorat V Itjen KKP Tahun 2023	13
3. Diagram Komposisi Kegiatan Pembangunan Zona Integritas	39
4. Capaian Predikat WBK Tahun 2014 s.d. 2023	43

## DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
1. Perkembangan Rencana Aksi Pencapaian IKU dan Penjelasan Kegiatan yang tidak dilaksanakan dalam Rencana Aksi Tahun 2023.....	62

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Arah Kebijakan dan Strategi dalam Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola salah satu pilarnya adalah reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui penguatan akuntabilitas kinerja organisasi dan reformasi sistem perencanaan dan penganggaran serta pengawasan.

Namun demikian, masih terdapat permasalahan pada tatanan birokrasi, seperti: pelanggaran disiplin, penyalahgunaan wewenang dan maraknya praktek KKN, rendahnya kinerja sumber daya manusia aparatur, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang belum memadai, rendahnya efisiensi dan efektivitas kerja, serta rendahnya kualitas pelayanan umum.

Untuk itu, diperlukan upaya keras dan sistematis untuk memperbaikinya. Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting dan diperlukan juga terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Hal-hal tersebut penting karena bermuara pada pencapaian cita-cita pembangunan nasional untuk terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Selaras dengan fungsinya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat V Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Itjen KKP) berkewajiban untuk memberikan kontribusi dan kinerja terbaik untuk mewujudkan agenda pembangunan nasional dalam RPJM 2020-2024, yaitu perbaikan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya serta reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

### **B. DASAR HUKUM**

Inspektorat V Inspektorat Jenderal KKP melaksanakan tugas dan fungsi, antara lain berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

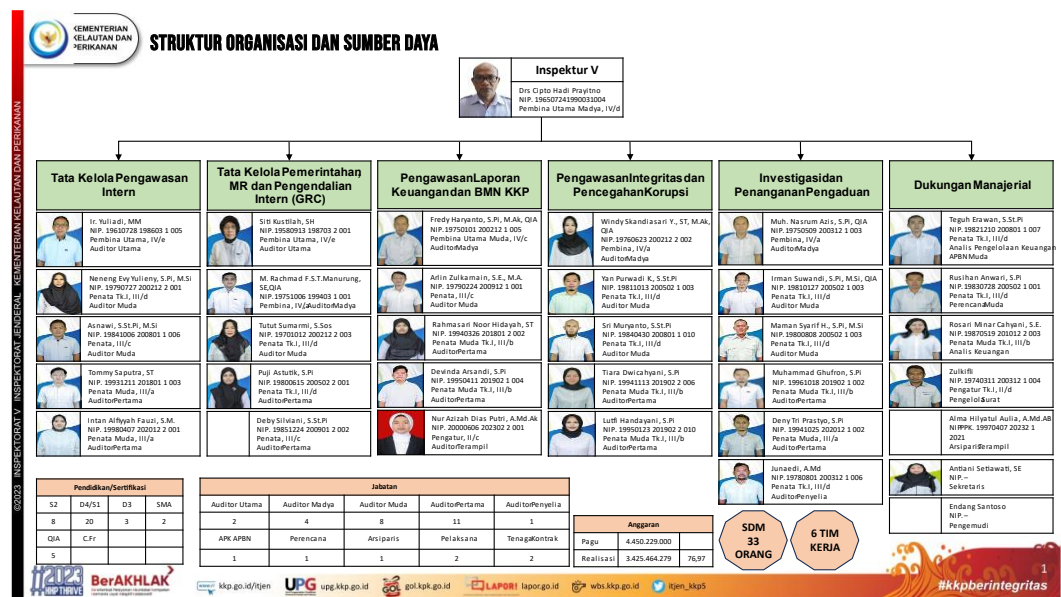
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2020 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

### **C. TUGAS DAN FUNGSI**

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Inspektorat V Itjen KKP memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta administrasi lingkup Inspektorat Jenderal, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta audit investigasi dan tindak lanjut pengaduan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut Itjen KKP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern lingkup Inspektorat Jenderal dan pengawasan untuk tujuan tertentu;
2. penyusunan rencana program pengawasan intern lingkup Inspektorat Jenderal dan pengawasan untuk tujuan tertentu;
3. pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan non keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya lingkup Inspektorat Jenderal;
4. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
5. pelaksanaan audit investigasi dan tindak lanjut pengaduan masyarakat;
6. pengawasan dan fasilitasi pembangunan budaya integritas;
7. koordinasi pelaporan pengawasan pelaksanaan reviu laporan keuangan;
8. pelaporan hasil pengawasan; dan
9. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Sesuai Peraturan Menteri tersebut, struktur Organisasi Inspektorat V Itjen KKP terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Pada Tahun 2023 untuk kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat V didukung pegawai sebanyak 33 orang dari berbagai bidang keahlian seperti ekonomi, keuangan, perikanan, dan lainnya. Pegawai Inspektorat V terdiri dari 1 orang Inspektur V, 1 orang Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial, 3 orang Pejabat Fungsional Umum dan 2 orang tenaga kontrak. Selain itu Inspektorat V didukung oleh Pejabat Fungsional Auditor sebanyak 26 terdiri dari 2 orang auditor utama, 4 orang auditor madya, 8 orang auditor muda, 11 orang auditor pertama, 1 orang auditor penyelia. Adapun struktur pembagian tugas dan fungsi Inspektorat V berdasarkan Surat Tugas Inspektorat V Nomor B.247/ITJ.5/KP.440/VII/2023 terdiri dari 6 (enam) Tim Kerja yaitu: 1) Penguatan Tata Kelola Pengawasan Intern; 2) Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern; 3) Pengawasan Laporan Keuangan dan BMN; 4) Pengawasan Integritas dan Pencegahan Korupsi; 5) Investigasi dan Penanganan Pengaduan; dan 6) Dukungan Manajerial yang secara lebih terperinci disajikan sebagaimana pada Gambar 1.



#### D. AGENDA INSPEKTORAT V ITJEN KKP

Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting dalam pemantapan tata kelola pemerintahan untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan tetap berkelanjutan. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dilaksanakan melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Selama ini, terdapat permasalahan pada tatanan birokrasi, seperti: pelanggaran disiplin, penyalahgunaan wewenang dan maraknya praktek KKN, rendahnya

kinerja sumber daya manusia aparatur, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang belum memadai, rendahnya efisiensi dan efektivitas kerja, serta masih rendahnya kualitas pelayanan umum.

Inspektorat Jenderal, melalui Inspektorat V Itjen KKP ikut serta dalam melaksanakan agenda pembangunan nasional dan Kementerian Kelautan dan Perikanan berupa Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara, dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan non keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya lingkup Inspektorat Jenderal;
2. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri baik yang bersifat mandatori maupun penugasan khusus di lingkungan KKP;
3. pelaksanaan audit investigasi dan tindak lanjut pengaduan masyarakat di lingkungan KKP;
4. pengawasan dan fasilitasi pembangunan budaya integritas di lingkungan KKP; dan
5. koordinasi pelaporan pengawasan pelaksanaan reviu laporan keuangan di lingkungan KKP.

#### **E. DASAR PELAPORAN KINERJA**

1. Peraturan Kementerian PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor DIPA- 032.02.0/2023 tanggal 30 November 2022.

## **F. TUJUAN PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran kinerja bertujuan untuk:

1. Menilai capaian kinerja yang telah dicapai Inspektorat Jenderal selama Tahun 2023 sesuai yang tercantum dalam dokumen penetapan kinerja.
2. Menilai capaian upaya untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat V Itjen KKP.

## **G. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Evaluasi kinerja mencakup pengukuran dokumen Penetapan Kinerja dan Perjanjian Kinerja level 2 yang disepakati Inspektur V dengan Inspektur Jenderal KKP.

## **H. WAKTU PENGUKURAN KINERJA**

1. Periode yang dinilai : Januari s.d. Desember 2023
2. Waktu pelaksanaan penilaian : Desember 2023

## **I. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan:

1. Pengukuran atas Sasaran Kinerja Itjen KKP sampai dengan 31 Desember 2023 berdasarkan Penetapan Kinerja Berbasis *Balanced Score Card* (BSC) Tahun 2023.
2. Pengukuran atas Rencana Aksi Kinerja pencapaian IKU sampai dengan 31 Desember 2023.

## **J. SISTEMATIKA LAPORAN**

Sistematika penyusunan laporan meliputi: 1) Pendahuluan meliputi latar belakang, dasar hukum, tugas dan fungsi, ruang lingkup dan metodologi pengukuran kinerja; 2) Perencanaan dan Perjanjian Kinerja mencakup Renstra KKP dan Itjen KKP, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja, dan Rencana Aksi Pencapaian IKU; 3) Akuntabilitas Kinerja yang berisi mengenai pengelolaan kinerja Itjen KKP, Capaian Kinerja TA 2023, dan Realisasi Rencana Aksi; dan 4) Penutup yang berisi mengenai kesimpulan, kendala/permasalahan dan saran untuk perbaikan kinerja.

## BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS KKP DAN ITJEN KKP TAHUN 2020 - 2024

Sejalan dengan perkembangan dunia global dan dinamika organisasi yang ada di KKP, Rencana Strategis KKP mengalami beberapa perubahan. Perubahan terakhir dari Renstra KKP menjadi dasar bagi unit Eselon I dibawahnya untuk melakukan penajaman terkait dengan Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sejalan dengan diterapkannya pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) di lingkungan KKP.

Adapun Visi-Misi KKP berdasarkan Renstra 2020 – 2024 dan turunannya pada Itjen KKP sebagai salah satu unit Eselon I dibawahnya dapat disampaikan sebagai berikut:

#### 1. Visi KKP dan Itjen KKP

Visi KKP, bisa diartikan sebagai keadaan yang ingin dicapai oleh KKP selama 5 (lima) tahun serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi KKP adalah:

***“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”***

Dengan Visi tersebut diharapkan dapat mewujudkan masa depan bangsa Indonesia yang mampu mengandalkan kemampuannya untuk dapat bersaing dengan bangsa lain. Untuk mendukung visi KKP tersebut, Itjen KKP mempunyai visi :

***“Terwujudnya KKP yang Berintegritas dan Akuntabel dalam Mewujudkan Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”***

Visi tersebut dilatarbelakangi oleh adanya keinginan seluruh pegawai KKP dan komitmen pimpinan yang kuat terhadap pelaksanaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menjunjung tinggi prinsip *good governance* dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi KKP.

Pernyataan visi tersebut merupakan idealisme, cita-cita, dan harapan dari segenap personil Itjen KKP. Disamping komitmen dan profesionalitas, juga diperlukan dukungan dan kerjasama yang konstruktif dari mitra kerja lingkup KKP.

#### 2. Misi Itjen KKP

Misi Itjen KKP dapat diartikan sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Itjen, yaitu:



- a. **Memberikan Pengawasan Intern Terbaik Untuk Peningkatan Kinerja KKP;**
- b. **Mendorong Pengendalian Intern Yang Efektif Terhadap Sistem dan Tata kelola KKP;**
- c. **Mendorong Terwujudnya Sumber Daya Aparatur KKP Yang Berintegritas dan Berorientasi Pelayanan Prima.**

Dalam misi tersebut, semakin jelas komitmen Itjen dalam mengawal pelaksanaan program-program KKP antara lain: Peningkatan Kehidupan Nelayan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan, serta Industrialisasi Kelautan dan Perikanan. Hal tersebut diperlukan demi meningkatkan kinerja KKP yang memiliki visi Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat.

### 3. Tujuan Itjen KKP

Tujuan strategis disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Itjen. Adapun tujuan strategis Itjen KKP adalah:

- a. **Terwujudnya Kinerja KKP yang Efektif dan Efisien;**
- b. **Terciptanya Suatu Sistem dan Tata Kelola KKP yang Baik;**
- c. **Terwujudnya Budaya Integritas di Lingkungan KKP.**

Tujuan yang ingin diwujudkan sudah pada tahapan yang tinggi yaitu efektifitas peran pengawasan internal. Keberhasilan capaian tujuan tersebut di indikasikan dengan capaian Sasaran Strategis. Adapun penjabaran lebih lanjut terhadap tujuan tersebut terhadap pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tujuan Itjen dan Indikator Tujuan

No.	Tujuan	Uraian	Indikator Tujuan
1.	Terwujudnya kinerja KKP yang efektif dan efisien	Itjen KKP memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi KKP	Itjen KKP mampu menilai ketaatan, efisiensi, efektivitas, dan ekonomis ( <i>value for money audit</i> )
2.	Terciptanya suatu sistem dan tata kelola KKP yang baik	Itjen KKP memberikan peringatan dini dan mendorong peningkatan efektivitas pengendalian intern dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi KKP	- Itjen KKP mampu mendeteksi terjadinya indikasi korupsi dan kolusi - Itjen KKP memberikan konsultasi pada tata kelola manajemen risiko dan pengendalian intern
		Itjen KKP memberikan upaya dalam bentuk pengawasan dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi KKP	Itjen KKP mampu memberikan jaminan atas proses tata kelola yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

No.	Tujuan	Uraian	Indikator Tujuan
3.	Terwujudnya budaya integritas di lingkungan KKP	Itjen KKP memberikan pendampingan dan asistensi serta pemantauan terhadap implementasi pembangunan zona integritas di lingkungan KKP	Itjen KKP mampu meningkatkan kualitas sumber daya aparatur KKP yang berintegritas

#### 4. Sasaran Strategis Itjen KKP

Sebagai unit pengawasan intern, Inspektorat Jenderal mendukung pencapaian Visi dan Misi KKP melalui dua Sasaran Strategis (SS) sebagai berikut:

1. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan KKP
2. Pengawasan Intern KKP yang Handal

Selanjutnya, sasaran tersebut diuraikan ke level di bawahnya diselaraskan pada level 2 yaitu Inspektorat I sampai dengan V dan Sekretariat Inspektorat Jenderal.

#### B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sebagai wujud pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP pada tahun 2023, Inspektorat V Itjen KKP melaksanakan kegiatan utama Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Dengan Tujuan Tertentu pada Pelaksana Pembangunan KP dan Pengawasan pada Unit Kerja Mitra Inspektorat V dengan alokasi anggaran senilai Rp4.450.229.000 dengan rencana output Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat V sebanyak 2 Laporan.

#### C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023

Sebagai penjabaran sasaran kinerja yang hendak dicapai dalam pengawasan pembangunan kelautan dan perikanan, telah ditetapkan target tiap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing sasaran kinerja yang tertuang dalam Penetapan Kinerja berbentuk Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 sebagaimana disampaikan pada Tabel 2 berikut.

**Tabel 2. Penetapan Kinerja Inspektorat V Itjen KKP TA 2023**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
1	2	3		4
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Mitra Inspektorat V	1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat V	≤1%
		2	Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat V	3,10

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
1	2	3		4
		3	Presentase Unit Kerja yang dilakukan Penilaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK oleh TPI (%)	100%
		4	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat V	80,50
		5	Nilai Integritas KKP	76
		6	Terkelolanya pelaporan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup KKP	100
2	Pengawasan Intern yang Handal pada Mitra Inspektorat V	7	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat V	81%
		8	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat V	81%
		9	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat V	75%
		10	Persentase Jumlah Rekomendasi Pengawasan Tujuan Tertentu yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja KKP	75%
		11	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	100%
		12	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat V	2 Rekom
		13	Persentase Pelaksanaan Penugasan Pengawasan dan Pelaporan Hasil Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan lingkup Mitra Inspektorat	88%
		14	Persentase Tingkat Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat	80%
3	Dukungan Internal Pengawasan yang Handal lingkup Inspektorat V	15	Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat	100%
		16	Terkelolanya Anggaran Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat V	100%

#### **D. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN**

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kinerja, sebagai unsur pengawasan intern lingkup KKP, Inspektorat V Itjen KKP melaksanakan “Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Dengan Tujuan Tertentu pada Pelaksana Pembangunan KP dan Pengawasan pada Unit Kerja Mitra Inspektorat V” dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Pengawasan terkait sasaran strategis “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Lingkungan Mitra Inspektorat V” melalui:
  - a. Reviu Laporan Keuangan pada unit kerja Itjen;
  - b. Reviu Laporan Keuangan pada Tingkat Kementerian;
  - c. Pengawasan dalam rangka Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan KKP;
  - d. Pemantauan/ Pendampingan pengelolaan pertanggungjawaban keuangan pada unit kerja Itjen;
  - e. Reviu Perencanaan dan Penganggaran pada unit kerja Itjen;
  - f. Kegiatan Konsultasi tentang Laporan Keuangan KKP;
  - g. Reviu (Penjaminan Kualitas) hasil Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi pada unit kerja Itjen;
  - h. Kegiatan Konsultasi tentang Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi pada unit kerja Itjen;
  - i. Evaluasi PMPRB pada unit kerja Itjen;
  - j. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan hasil evaluasi PNPBRB pada unit kerja Itjen;
  - k. Evaluasi Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan pada unit kerja Itjen;
  - l. Evaluasi Implementasi SAKIP pada unit kerja Itjen;
  - m. Kegiatan Konsultasi tentang Implementasi SAKIP pada unit kerja Itjen;
  - n. Pemantauan dan Evaluasi unit kerja berpredikat menuju WBK yang akan dinilai TPN;
  - o. Pemantauan terhadap unit kerja yang telah mendapat predikat menuju WBK;
  - p. Penilaian terhadap unit kerja yang diusulkan untuk dinilai TPI;
  - q. Evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi lingkup KKP;
  - r. Verifikasi LHKASN Lingkup KKP;
  - s. Koordinasi pelaksanaan Survey Integritas KKP;
  - t. Pemantauan Stranas Pencegahan Korupsi Lingkup KKP;
  - u. Koordinasi pemantauan dan pelaporan Stranas lingkup KKP; dan
  - v. Kegiatan Konsultasi tentang Pembangunan Integritas KKP dan Pembangunan Zona Integritas.

2. Pengawasan terkait sasaran strategis “Pengawasan Intern Yang Handal Pada Mitra Inspektorat V”, melalui:
  - a. Evaluasi Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Pada Unit Kerja Itjen;
  - b. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara TA 2025 Pada Unit Kerja Itjen;
  - c. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara TA 2025 tingkat Kementerian;
  - d. Kegiatan Konsultansi tentang Pengelolaan BMN Lingkup Itjen;
  - e. Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ Pada Unit Kerja Itjen;
  - f. Evaluasi Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa pada unit kerja Itjen;
  - g. Kegiatan Konsultansi tentang Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Itjen;
  - h. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada unit kerja Itjen;
  - i. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada unit kerja lingkup KKP;
  - j. Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas Pengaduan pada unit kerja lingkup KKP;
  - k. Audit dengan Tujuan Tertentu atas Pengaduan pada unit kerja lingkup KKP;
  - l. Telaah/Kajian Kebijakan dalam rangka pemberian rekomendasi Perbaikan Kebijakan pada unit kerja Inspektorat Jenderal;
  - m. Audit dengan Tujuan Tertentu pada unit kerja Inspektorat Jenderal dan KKP (Tematik/TATD);
  - n. Evaluasi Kendali mutu Pengawasan pada unit kerja Itjen;
  - o. Kendali Mutu Pengawasan dan kertas kerja pengawasan yang disusun dan/atau direviu Per jenjang;
  - p. Evaluasi Kepatuhan PKPT pada unit kerja Itjen;
  - q. Penyusunan Surat Usulan Penugasan Pengawasan lingkup Itjen; dan
  - r. Monev Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT lingkup Itjen.
3. Dukungan pengawasan terkait sasaran strategis “Dukungan Manajemen Pengawasan Yang Handal Lingkup Inspektorat V”, melalui:
  - a. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan pada unit kerja Itjen;
  - b. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu pada unit kerja lingkup KKP;
  - c. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan pada unit kerja linkup KKP;
  - d. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Integritas pada unit kerja llingkup KKP;
  - e. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup Inspektorat V; dan
  - f. Penyusunan Laporan Perencanaan dan Keuangan serta administrasi ketatausahaan lingkup Inspektorat V.

## BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

### A. PENGELOLAAN KINERJA INSPEKTORAT V ITJEN KKP

Pengelolaan kinerja merupakan sistem manajemen yang dilakukan organisasi di dalam mencapai sasaran kinerja yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, Inspektorat V Itjen KKP sebagai bagian dari tim pengelola kinerja Itjen KKP untuk melaksanakan pengumpulan data kinerja, kemudian mengukur, dan mengevaluasi perkembangan capaian kinerja secara berkala. Hasil pengukuran tersebut akan memberikan gambaran tingkat keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian seluruh sasaran kinerja yang telah diperjanjikan. Data capaian kinerja diolah dan disajikan dalam aplikasi manajemen kinerja berbasis website di *kinerjaku.kkp.go.id* dengan kategorisasi (penentuan posisi) tingkat capaian kinerja berdasarkan warna Hijau/Baik (90 – 120%), Kuning/Cukup (70 - <90%), Orange/Kurang (50 - <70%), Merah/Sangat Kurang (<50%), dan Abu-abu atau belum ada penilaian sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Rentang Penilaian Capaian Kinerja

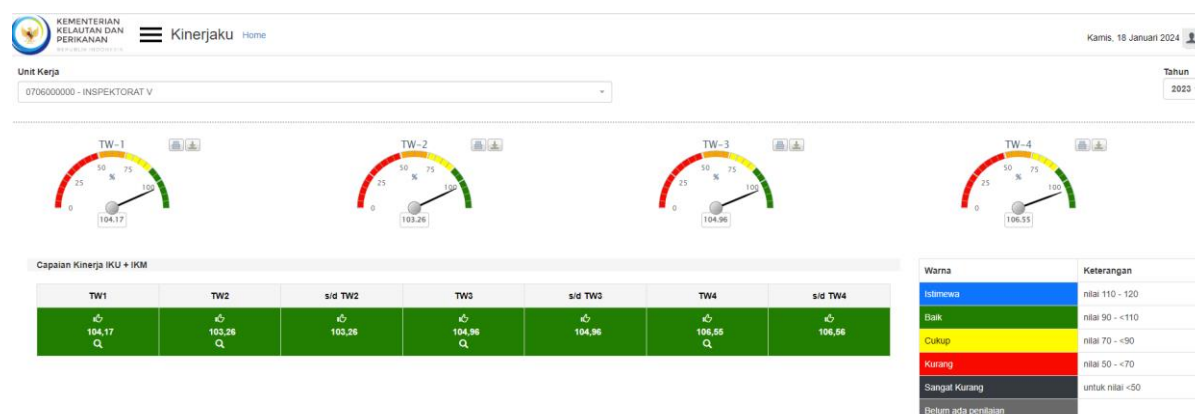
No	Kode Warna	Rentang Nilai
1.	Baik	90 – 120%
2.	Cukup	70 - <90%
3.	Kurang	50 - <70%
4.	Sangat Kurang	< 50%
5.	Belum ada penilaian	-

### B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Tahun 2023 merupakan hasil pelaksanaan program/kegiatan Inspektorat V Itjen KKP berupa *output* dan *outcome* yang keberhasilannya dinilai melalui pengukuran kinerja secara sistematis dengan dukungan Sistem Informasi. Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan kedalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis/kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang

menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2023, Sasaran kinerja Inspektorat V terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Strategis (SS) yang diukur keberhasilan pencapaiannya melalui capaian 16 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Kondisi capaian kinerja Inspektorat V Tahun 2023 berdasarkan pengukuran kinerja dengan menggunakan aplikasi pengelolaan kinerja dapat disampaikan sebagaimana gambar berikut.



Gambar 2. Nilai Rata-rata Capaian Kinerja Inspektorat V Itjen KKP Tahun 2023

Gambar di atas menunjukkan nilai rata-rata pencapaian kinerja Inspektorat V tahun 2023 mencapai 106,56 atau berada pada kategori “Baik”. Capaian tersebut diperoleh dari nilai rata-rata dari tiga Sasaran Strategis dengan 16 Indikator Kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Kondisi capaian dari masing-masing Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. Capaian SS dan IKU Inspektorat V KKP Tahun 2023

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISASI	NILAI (%)
1	2	3		4	5	6
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Mitra Inspektorat V	1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat V	≤1%	0,0	200%
		2	Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat V	3,10	3,56	114,84
		3	Presentase Unit Kerja yang dilakukan Penilaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK oleh TPI (%)	100%	100,00	100,00
		4	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat V	80,50	81,89	101,73

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISASI	NILAI (%)
1	2	3		4	5	6
		5	Nilai Integritas KKP	76	80,32	105,68
		6	Terkelolanya pelaporan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup KKP	100	100%	100%
2	Pengawasan Intern yang Handal pada Mitra Inspektorat V	7	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat V	81%	90,00	111,11
		8	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat V	81%	99,50	122,84
		9	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat V	75%	78,33	104,44 %
		10	Persentase Jumlah Rekomendasi Pengawasan Tujuan Tertentu yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja KKP	75%	81,97	109,29
		11	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	100%	100	100,00
		12	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat V	2 Rekom	2,00	100,00
		13	Persentase Pelaksanaan Penugasan Pengawasan dan Pelaporan Hasil Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan lingkup Mitra Inspektorat	88%	99,13	112,65



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISASI	NILAI (%)
1	2	3		4	5	6
		14	Persentase Tingkat Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat	80%	93,97	117,46
3	Dukungan Internal Pengawasan yang Handal lingkup Inspektorat V	15	Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat	100%	100%	100,00%
		16	Terkelolanya Anggaran Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat V	100%	100%	100,00%

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa kinerja Inspektorat V Itjen pada Tahun 2023 memuaskan dimana dari 16 IKU yang diperjanjikan, sebanyak 11 IKU dapat tercapai melampaui target dan empat IKU tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Perlu diinformasikan bahwa nilai capaian kinerja maksimal pada aplikasi pengelolaan kinerja KKP (*kinerjaku.kkp.go.id*) ditetapkan 120%. Dengan kata lain, **persentase capaian pada aplikasi dibatasi pada angka 120% sebagai nilai capaian maksimal**. Secara lebih rinci, capaian kinerja dari masing-masing SS dan IKU Inspektorat V Tahun 2023 disampaikan sebagai berikut.

### SS-1 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Mitra Inspektorat V (Itjen KKP)

Sasaran Strategis ini ditetapkan dalam rangka mendorong peningkatan kualitas tata kelola di lingkungan Itjen KKP secara terukur dan berkelanjutan. Tata kelola yang baik merupakan hal yang sangat penting dan fundamental dalam setiap program/kegiatan pembangunan. Dengan tata kelola yang baik, setiap program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah diharapkan dapat berjalan secara akuntabel, efektif, dan efisien sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Untuk itu, sesuai dengan fungsinya, Inspektorat V Itjen KKP menjadikan tata kelola yang baik di lingkungan Itjen KKP sebagai Sasaran Strategis pertama dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Kelautan dan Perikanan. Hal ini juga sejalan dengan PP 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menerangkan bahwa salah satu fungsi APIP adalah Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Dalam pelaksanaannya, upaya Inspektorat V dalam mendorong terwujudnya tata kelola yang

baik di lingkungan Itjen KKP diukur dan dipertanggungjawabkan melalui capaian lima Indikator Kinerja sebagaimana berikut.

### **IKU-1. Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat V (Itjen KKP)**

Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Itjen KKP adalah jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi KKP atas hasil pemeriksaan BPK Tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi anggaran KKP tahun 2022. Sehubungan dengan realisasi IKU ini menggunakan data hasil pemeriksaan BPK RI, sehingga frekuensi pengukuran IKU ini bersifat tahunan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *Minimize* (semakin kecil lebih baik). Pengukuran kinerja IKU ini dilakukan secara tahunan yaitu pada Triwulan III. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Itjen Tahun 2023, Nilai temuan materialitas LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP adalah sebesar 0,0% dari target  $\leq 1\%$ . Dengan demikian capaian IKU ini tercapai sebesar 120% pada aplikasi pengelolaan kinerja KKP. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka capaian tahun 2023 sama dengan capaian tahun 2022. Perkembangan capaian nilai temuan materialitas pengawas eksternal pada Itjen KKP disajikan pada tabel berikut.

Dalam rencana jangka menengah 2020-2024, target IKU ini ditetapkan sebesar  $\leq 1\%$  setiap tahun (**stabilized**), begitu juga pada periode sebelumnya. Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan target 2024 atau akhir perencanaan jangka menengah maka kondisi capaian akan sama dengan kondisi tahun ini.

Tabel 5. Perbandingan Capaian Nilai Temuan Materialitas Mitra Inspektorat V Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2022	%
Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat V	$\leq 1\%$	0,00%	120%	$\leq 1\%$	0,00%	120%	$\leq 0,5\%$	0,00%	120%

Dalam pengelolaan keuangan perlu mendapat perhatian terkait ketelitian pengelola keuangan dalam mengadministrasikan berkas pertanggungjawaban keuangan, sehingga mempermudah dalam pencarian data/informasi yang diperlukan jika dibutuhkan.

### **IKU-2. Tingkat Maturitas Implementasi SPI Mitra Inspektorat V (Itjen KKP)**

Level Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) Itjen KKP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan Mitra Inspektorat V. Kerangka

maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan yaitu: Level 0 (belum ada), Level 1 (rintisan), Level 2 (berkembang), Level 3 (terdefinisi), Level 4 (terkelola dan terukur), dan Level 5 (optimum). Setiap tingkat maturitas mempunyai karakteristik dasar yang menunjukkan peran atau kapabilitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah. Pada Tahun 2023, Inspektorat V Itjen KKP menargetkan tingkat maturitas implementasi SPI Mitra Inspektorat V berada pada Level 3. Dalam prosesnya, pengukuran tingkat maturitas SPI KKP mengacu kepada hasil penilaian BPKP. Namun bilamana BPKP tidak melakukan penilaian atau belum mengeluarkan hasil penilaian saat penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (LKj), maka tingkat maturitas ditentukan berdasarkan hasil penilaian mandiri oleh Itjen KKP.

Pada akhir Tahun 2023, BPKP telah melakukan penilaian terhadap tingkat maturitas SPI KKP namun hasil penilaian belum disampaikan kepada KKP hingga saat penyusunan LKJ Tahunan. Oleh karena itu, tingkat maturitas SPI KKP Tahun 2023 mengacu kepada hasil penilaian mandiri oleh Itjen dimana berdasarkan penilaian ini tingkat maturitas SPI Mitra Inspektorat V berada pada Level 3 atau “terdefinisi”. Level ini secara umum menggambarkan:

- a. Inspektorat Jenderal telah menerapkan pengendalian internal yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan organisasi.
- b. Evaluasi formal dan terdokumentasi, namun sebagian besar evaluasi dilakukan secara manual dan belum menggunakan alat bantu aplikasi komputer.

Dengan demikian, capaian kinerja Inspektorat V dalam mendorong tingkat maturitas SPI Itjen KKP tercapai pada Level 3 dari target Level 3 (nilai maksimal 120% pada aplikasi kinerja).

Tabel 6. Perbandingan Capaian Level Maturitas SPIP Mitra Inspektorat V Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2022	%
Level Maturitas SPIP Mitra Inspektorat V	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%

Hal yang perlu mendapat perhatian dalam peningkatan maturitas SPIP yaitu perlu “mengintegrasikan dan menginternalisasikan pengendalian intern sebagai proses yang melekat/integral dengan proses kegiatan lainnya, evaluasi secara berkala atas efektivitas prosedur pengendalian dan pemantauan yang terintegrasi dalam kegiatan secara otomatis”.

### **IKU-3. Persentase Unit Kerja yang dilakukan Penilaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK oleh TPI (%)**

Persentase Unit Kerja yang dilakukan Penilaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK oleh TPI adalah nilai yang mencerminkan implementasi pembangunan zona integritas pada unit kerja pada periode penilaian oleh Tim Penilai Internal (TPI). Penilaian dilaksanakan untuk menilai suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar komponen penilaian yang meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan PERMEN PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil pengelolaan data, diketahui bahwa tahun 2023 Unit kerja yang diusulkan/ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK sebanyak 18 unit kerja telah terlaksana sesuai target 100% dengan hasil 14 unit kerja memenuhi syarat WBK dan 4 unit kerja belum memenuhi syarat WBK. Perlu disampaikan bahwa target IKU ini ditetapkan pada angka yang sama setiap tahunnya (*stabilized*) sehingga bila dibandingkan dengan target jangka menengah (Tahun 2024) kondisinya akan sama dengan capaian tahun 2023.

Tabel 7. Perbandingan Jumlah Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK Tingkat KKP Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Nilai SAKIP Mitra Inspektorat V	-	-	-	100	100	100%	100	100	100%

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu terkait implementasi dan substansi yang diharapkan dari pembangunan zona integritas yang masih dinilai belum optimal atau masih orientasi pemenuhan oleh unit kerja.

### **IKU-4. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat V (Itjen KKP)**

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja adalah nilai yang mencerminkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) di lingkup Itjen KKP pada periode evaluasi. Evaluasi dilaksanakan untuk menilai kualitas lima komponen sistem akuntabilitas kinerja yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja. Sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kualitas manajemen kinerja KKP secara berkelanjutan, Itjen menetapkan nilai SAKIP sebagai salah satu Indikator Kinerja yang diukur melalui hasil penilaian Kementerian PAN dan RB. Seiring kebutuhan untuk

mempercepat proses pengelolaan data kinerja pada Tahun 2023, Inspektorat V Itjen KKP menetapkan target nilai SAKIP Itjen KKP dengan predikat A dengan nilai 80,50 berdasarkan hasil penilaian mandiri.

Berdasarkan hasil penilaian mandiri oleh Itjen yang kemudian disampaikan kepada Kementerian PAN dan RB melalui Surat Inspektur Jenderal KKP, Itjen KKP mendapat predikat A dengan nilai 81,89 atau 101,73% dari target 80,50. Capaian ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 80,73. Bila dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan sebesar 82,5 pada tahun 2024, maka capaian tahun 2023 telah mencapai target atau 99,26%

Tabel 8. Perbandingan Capaian Nilai SAKIP Itjen KKP Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Nilai SAKIP Mitra Inspektorat V	80,01	80,73	100,90%	80,50	81,89	101,73%	82,5	81,89	99,26

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam peningkatan nilai SAKIP yaitu terkait penyajian informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi dalam Laporan Kinerja, dan pelaksanaan Pemantauan Rencana Aksi setiap bulan.

#### **IKU-5. Nilai Integritas KKP**

Upaya mewujudkan pemerintahan bersih terus dilakukan di lingkungan KKP sebagai salah satu sumber persoalan yang diidentifikasi menghambat upaya ini adalah rendahnya integritas birokrasi, yang bisa menyebabkan pelayanan publik tidak transparan, tidak akuntabel, dan berpotensi korupsi. Pada dasarnya, KKP telah menginisiasi upaya pemberantasan korupsi melalui perbaikan integritas.

Survei Penilaian Integritas merupakan upaya untuk memetakan risiko korupsi dan capaian upaya pencegahan korupsi yang dilakukan KKP. Hasil pemetaan dapat dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi dengan rencana aksi yang sesuai karakteristik KKP dan berdasarkan hasil pemetaan empiris

Hasil Survey Integritas memiliki banyak manfaat baik bagi KKP antara lain: (1. mengidentifikasi area prioritas perbaikan yang rentan terhadap korupsi, sebagai dasar perbaikan program pencegahan korupsi; 2) memberikan informasi capaian upaya pencegahan korupsi dan aktivitas antikorupsi; 3) mendorong peran serta masyarakat dalam peningkatan integritas dan kepercayaan (trust) publik; 4) melihat kesiapan seluruh dalam pelaksanaan survei secara elektronik, baik dari sisi ketersediaan data populasi, maupun pelaksanaan survei elektronik.

Nilai integritas KKP diperoleh berdasarkan hasil survei terhadap pegawai (internal) dan stakeholders (eksternal) dengan indikator-indikator yang terukur dalam hal pemetaan risiko korupsi, pengelolaan anggaran, dan efektifitas pencegahan korupsi di lingkungan unit Eselon I dan KKP. Dalam hal ini, survei dilakukan oleh KPK atau Inspektorat V sebanyak satu kali dalam satu tahun.

Berdasarkan hasil Survey Integritas yang dilakukan KPK, KKP mendapat memperoleh nilai 80,32 atau 107,09% dari target 75,00. Capaian ini belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dikarenakan merupakan IKU baru. Bila dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan sebesar 77 pada tahun 2024, maka capaian tahun 2023 telah mencapai target atau 104.31%.

Tabel 9. Perbandingan Capaian Nilai Integritas KKP Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Nilai Integritas KKP	75	80,32	107,09%	76	80,32	105,68%	77	80,32	104,31%

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan rekomendasi KPK dalam upaya pencegahan korupsi dan peningkatan capaian Nilai Integritas yaitu:

1. Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye aturan mengenai sistem merit dan pengelolaan benturan kepentingan dalam pengelolaan SDM di seluruh tingkat jabatan di instansi;
2. Mempertahankan, menginovasikan, dan memonitor secara berkala upaya yang telah dilakukan, hingga tidak ada lagi pegawai yang menerima suap/gratifikasi dari pengguna layanan di instansi;
3. Intensifikasi, sosialisasi, serta kampanye penegakan aturan mengenai pengelolaan benturan kepentingan serta penyalahgunaan perjalanan dinas, mark up anggaran, penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan honor kegiatan;
4. Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye (jika sudah ada) mengenai upaya pencegahan yang telah dilakukan kepada seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal berikut: (1) Proses dan alur dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Peran dan independensi unit kerja pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Penguatan mekanisme probity audit berkala untuk mendeteksi adanya masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa. (4) Penggunaan vendor management system. (5) Kebijakan, regulasi, dan mekanisme penanganan benturan kepentingan dalam proses pengadaan. (6) Proses pengadaan dan pembayaran

secara elektronik yang sudah disiapkan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;

5. Mempertahankan, menginovasikan, dan memonitor secara berkala upaya yang telah dilakukan untuk melindungi pelapor praktik korupsi, hingga tidak ada lagi respons negatif terhadap pelapor praktik korupsi;
6. Mempertahankan, menginovasikan, dan memonitor secara berkala upaya yang telah dilakukan, untuk meminimalkan hingga tidak memberikan toleransi bagi pengaruh pihak eksternal dalam menentukan program/kegiatan;
7. Mempertahankan upaya internalisasi kesadaran dan perilaku untuk melaporkan LHKPN, meskipun sebagian besar responden menganggap tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN tinggi;
8. Mempertahankan penyediaan informasi tentang pelaksanaan tugas yang memadai, meskipun sebagian besar responden menganggap penyediaan informasi sudah baik;
9. Perbaiki mendasar terhadap upaya peningkatan prosedur layanan yang sudah dilakukan dengan memastikan berbagai hal berikut: (1) Proses bisnis yang sederhana dan tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan. (2) Optimalisasi penggunaan teknologi dalam pengambilan keputusan terkait dengan layanan yang diberikan. (3) Evaluasi dan memotret sudut pandang pengguna layanan terkait dengan prosedur dan kejelasan layanan.

#### **IKU-6. Terkelolanya pelaporan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup KKP**

Terkelolanya pelaporan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup KKP adalah nilai yang mencerminkan pemenuhan, koordinasi dan pelaporan dalam pencapaian 5 Aksi Pencegahan Korupsi di lingkungan KKP tahun 2023-2024 yaitu: 1) Aksi 1 - Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang Melalui Pendekatan Kebijakan Satu Peta; 2) Aksi 2 - Penguatan Pengendalian Ekspor dan Impor; 3) Aksi 3 - Reformasi Tata Kelola Pelabuhan; 4) Aksi 6 - Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan untuk Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim; dan 5) Aksi 7 - Perbaikan Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah target 100% berdasarkan kewajiban pelaporan pada aplikasi jaga.id yang dimiliki Komisi pemberantasan Korupsi (KPK).

Pengukuran terkelolanya pelaporan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup KKP merupakan ukuran kinerja berdasarkan terselenggaranya pelaporan rencana aksi pencegahan korupsi di lingkungan KKP secara tertib dan akuntabel serta tepat waktu melalui laman <https://jaga.id/>.

Berdasarkan hasil pengelolaan data, diketahui bahwa tahun 2023 pencapaian 5 Aksi Pencegahan Korupsi di lingkungan KKP telah terpenuhi dan dilaporkan seluruhnya atau

100%. Perlu disampaikan bahwa target IKU ini ditetapkan pada angka yang sama setiap tahunnya (*stabilized*) sehingga bila dibandingkan dengan target jangka menengah (Tahun 2024) kondisinya akan sama dengan capaian tahun 2023.

Tabel 10. Perbandingan pengelolaan pelaporan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Nilai SAKIP Mitra Inspektorat V	-	-	-	100	100	100%	100	100	100%

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam peningkatan kepatuhan yaitu perlunya merencanakan program Audit PBJ Elektronik Tahun 2024 dan berkoordinasi dengan BPKP dan LKPP terkait pedoman dan pengembangan sistem audit elektronik.

## SS-2 Pengawasan Intern yang Handal pada Mitra Inspektorat V

### IKU-7. Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat V (Itjen KKP)

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Itjen KKP merupakan salah satu kegiatan strategis yang mendukung dan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan BMN mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KKP dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas laporan keuangan. Keterlibatan sumber daya yang besar dalam pengelolaan BMN seringkali diikuti dengan berbagai hambatan/ permasalahan, dan bahkan menjadi temuan berulang aparat pengawasan internal maupun eksternal. Pengawasan terhadap pengelolaan BMN diperlukan untuk memastikan kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Itjen KKP melalui kegiatan pengelolaan BMN, Inspektorat V Itjen KKP telah menetapkan Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP sebadai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2023. Hal ini ditujukan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan Inspektorat V Itjen KKP dalam mengawasi pengelolaan BMN di Lingkungan Itjen KKP. IKU tersebut merupakan suatu ukuran yang menggambarkan efektivitas kualitas kinerja pengawasan intern KKP dalam mengawal dan memastikan pengelolaan BMN lingkup Itjen KKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2023, tingkat Efektifitas Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan BMN ditargetkan mencapai 81% dan diukur secara tahunan pada Triwulan IV. Pengukuran dilaksanakan melalui kegiatan evaluasi dengan indikator/variabel, yaitu: 1) Kualitas Perencanaan Pengawasan; 2)



Kualitas Pelaksanaan Pengawasan; dan 3) Nilai Rata-rata Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Unit Eselon I lingkup Itjen KKP.

Berdasarkan hasil penilaian, Itjen KKP mendapat 90,00 atau 111,11% dari target 81%. Capaian ini mengalami penurunan dari Tahun sebelumnya sebesar 92,50 atau 116,63% dari target 80. Bila dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan sebesar 82 pada tahun 2024, maka capaian tahun 2023 telah mencapai 109,76%.

Tabel 11. Perbandingan Capaian Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Itjen KKP Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP	80	92,50	116,63%	81	90	111,11%	82	90	109,76%

Hal yang perlu mendapat perhatian dalam peningkatan capaian efektivitas pengelolaan BMN yaitu untuk memperkuat kegiatan konsultasi/pendampingan atas pengelolaan BMN.

#### **IKU-8. Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat V (Itjen KKP)**

Pengadaan barang/jasa (PBJ) merupakan bagian dari aktivitas pembangunan yang rutin dilaksanakan oleh instansi pemerintah setiap tahunnya. Kegiatan ini menjadi sangat strategis dan penting untuk dilakukan pengawasan karena seingkali bernilai besar, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi, dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menentukan kualitas Laporan Keuangan. Karenanya, pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan kesesuaian hasil pelaksanaan terhadap perencanaan, prosedur dan aturan yang berlaku.

Dalam rangka mendorong pengawasan PBJ yang efektif, pada tahun 2023, Inspektorat V Itjen menetapkan indikator kinerja Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa dengan target 81% sebagai suatu ukuran untuk menggambarkan kualitas kinerja pengawasan Itjen dalam mengawal dan memastikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa lingkup KKP dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku. Pengukuran dilaksanakan secara tahunan pada Triwulan IV melalui kegiatan evaluasi dengan indikator/variabel, yaitu: 1) Kualitas Perencanaan Pengawasan; 2) Kualitas Pelaksanaan Pengawasan; dan 3) Nilai Rata-rata Tingkat Kepatuhan PBJ Unit Eselon I lingkup KKP.

Berdasarkan hasil penilaian, Itjen KKP mendapat 99,50 atau 122,84% dari target 81. Capaian ini lebih baik dari Tahun sebelumnya sebesar 91,04 atau 113,80% dari target 80. Bila dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan sebesar 82 pada

tahun 2024, maka capaian tahun 2023 telah mencapai 121,76%.

Tabel 12. Perbandingan Capaian Tingkat Efektivitas Pengawasan PBJ Lingkup KKP Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Tingkat Efektivitas Pengawasan PBJ Lingkup KKP	80%	91,04%	113,80%	81%	99,84%	122,84%	82	99,84%	121,76%

Terkait pencapaian tahun 2023, terdapat beberapa hal yang perlu disempunakan kedepan, diantaranya: 1) memperkuat penilaian risiko PBJ, dan melakukan pemantauan atas aktivitas pengendalian berdasarkan manajemen risiko.

### **IKU-9. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat V (Itjen KKP)**

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat V yang ditindaklanjuti secara tuntas oleh Itjen KKP yang menjadi objek pengawasan dengan target 75% pada tahun 2023. Dari hasil pengukuran kinerja, jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti atau dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja oleh Itjen KKP sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 sebanyak 78,33% atau 104,44% dari target 75%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka capaian tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 79,75% atau 113,93% dari target 70% yang disebabkan perbedaan perlakuan terhadap input data pada aplikasi SIDAK untuk *Area of Improvement* pada pengawasan kapabilitas APiP dan Reformasi Birokrasi. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target jangka menengah, maka capaian tahun 2023 masih sebesar 97,91% dari target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 80%.

Perkembangan jumlah hasil pengawasan Itjen yang dimanfaatkan oleh mitra kerja dari tahun ke tahun disajikan pada tabel berikut.

Tabel 13. Perbandingan Capaian Kinerja Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat V Tahun 2023 dengan Capaian Tahun 2022 dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup mitra Inspektorat V	70	79,75	113,93%	75	78,33	104,44%	80	78,33	97,91%

Sebagaimana disajikan pada tabel di atas, angka capaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat V menunjukkan trend positif. Hal ini tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas atau upaya yang dilakukan oleh Inspektorat V namun komitmen dan keseriusan dari unit kerja untuk segera menyelesaikan saran yang diberikan oleh Inspektorat V akan sangat menentukan capaian kinerja IKU ini. Untuk itu diperlukan pengawasan secara berkelanjutan untuk mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern oleh mitra kerja.

**IKU-10. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Tujuan Tertentu yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja KKP**

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat V yang ditindaklanjuti secara Tuntas dan Proses oleh unit kerja lingkup KKP yang menjadi objek pengawasan dengan target 75% pada tahun 2023. Dari hasil pengukuran kinerja, jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti atau dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja KKP sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 sebanyak 81,97% atau 109,29% dari target 75%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka capaian tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 79,59% atau 113,70% dari target 70%. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target jangka menengah dapat disampaikan bahwa capaian tahun 2023 mencapai 102,46% dari target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 80%.

Perkembangan jumlah hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja KKP dari tahun ke tahun disajikan pada tabel berikut.

Tabel 14. Perbandingan Capaian Kinerja Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tujuan Tertentu lingkup KKP Tahun 2023 dengan Capaian Tahun 2022 dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Tujuan Tertentu yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja KKP	70%	79,59%	113,70%	75%	81,97%	109,29%	75%	81,97%	109,29%

Sebagaimana disajikan pada tabel di atas, angka capaian tindak lanjut hasil pengawasan dengan tujuan tertentu menunjukkan trend positif. Hal ini tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas atau upaya yang dilakukan oleh Inspektorat V namun komitmen dan keseriusan dari unit kerja untuk segera menyelesaikan saran yang diberikan oleh Inspektorat V akan sangat menentukan capaian kinerja IKU ini. Untuk itu diperlukan pengawasan secara berkelanjutan untuk mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern oleh mitra kerja.

### **IKU-11. Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti**

Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti Lingkup KKP merupakan gambaran kinerja penanganan pengaduan yang diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan Kementerian (Inspektorat V). Ukuran capaian berdasarkan respon terhadap laporan pengaduan yang telah ditindaklanjuti sebanyak 100%. Pengaduan dapat berasal dari pegawai dan/atau masyarakat atas tindakan yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan KKP yang berkaitan dengan dugaan: a) penyalahgunaan wewenang; b) pelanggaran disiplin Pegawai; c) hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau d) tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Berdasarkan hasil pengukuran persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun 2023 mencapai sesuai target 100,00% (862 pengaduan). Capaian ini sama seperti Tahun sebelumnya sebesar 100,00% (901 pengaduan), namun volume pengaduan sedikit menurun yang menandakan implementasi saluran pengaduan LAPO! masih optimal. Bila dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan sebesar 100,00% pada tahun 2024, maka capaian tahun 2023 telah mencapai 100,00%.

Tabel 15. Perbandingan Capaian Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Capaian Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Terkait pencapaian tahun 2023, terdapat beberapa hal yang perlu disempunakan kedepan, yaitu melakukan evalausi pengelolaan untuk perbaikan pelayanan publik dan mendorong pengelola pengaduan lingkup KKP khususnya tingkat Eselon I dan UPT untuk melakukan input data pengaduan kedalam aplikasi SP4N LAPOR!.

### **IKU-12. Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat V (Itjen KKP)**

Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan adalah rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat V kepada mitra kerja yang menjadi objek pengawasan untuk melakukan perubahan, penambahan dan/atau penyempurnaan peraturan, kebijakan, maupun sistem dan prosedur administrasi/operasi. Hal ini sejalan dengan kebijakan pengawasan tahun 2023, yaitu selain sebagai penjamin mutu (*Quality Assurance*), Inspektorat V perlu menitikberatkan perannya sebagai konsultan (*Advisory Services*) yang akan memberikan jasa konsultasi serta saran perbaikan dalam proses pelaksanaan program/kegiatan juga pada tataran kebijakan.

Pada tahun 2023, Inspektorat V menargetkan untuk melakukan pengawasan atau kajian terhadap minimal 1 kebijakan/peraturan/prosedur operasi lingkup Itjen KKP. Dalam hal ini, pengawasan berupa kajian tersebut ditujukan untuk mendorong penyempurnaan dan penguatan implementasi kebijakan/peraturan/prosedur terkait tata kelola pelaksanaan program/kegiatan pada Itjen KKP.

Berdasarkan pemantauan kinerja tahun 2023, terdapat 2 kajian yang dilaksanakan oleh Inspektorat V dapat terealisasi sesuai target 2 kajian atau 100,00%. Capaian ini sama dengan tahun sebelumnya yang mencapai 2 kajian atau 100,00% dari target. Selanjutnya, perlu disampaikan bahwa target IKU ini ditetapkan pada angka yang sama setiap tahunnya (*stabilized*). Perbandingan capaian tahun 2023 dengan capaian tahun lalu dan target jangka menengah disampaikan pada tabel berikut.

Tabel 16. Perbandingan Capaian Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat V Tahun 2022 dengan Capaian Tahun 2021 dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat V	2	2	100,00%	2	2	100,00%	2	2	100,00%

Adapun rekomendasi perbaikan yang dihasilkan oleh Inspektorat V terhadap kebijakan/peraturan/prosedur pada mitra kerja Tahun 2023 yaitu berdasarkan surat Inspektur V Nomor B.496.1/ITJ.5/KP.440/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 perihal Kajian Penerapan Kebijakan Lingkup Inspektorat Jenderal (Sistem Informasi Pengawasan); dan berdasarkan surat Inspektur V Nomor T.446/ITJ.5/TU.220/XII/2023, 7 Desember 2023 perihal Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Kearsipan Tahun 2023 pada Itjen KKP

### **IKU-13. Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Mitra Inspektorat V (Itjen KKP)**

Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan dan pelaporan hasil pengawasan yang memenuhi standar pelaksanaan pengawasan adalah jumlah penugasan dan pelaporan hasil audit oleh Inspektorat V pada mitra kerja yang memenuhi standar mutu pengawasan yang diukur dari tingkat kepatuhan penyampaian formulir Kendali Mutu Pengawasan (KMP). Pada tahun 2023, kegiatan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan secara optimal ditargetkan minimal 88% dari seluruh kegiatan pengawasan yang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat V, realisasi capaian IKU ini sebesar 99,13% dari target 88% atau tercapai sebesar 112,65% dari target. Angka capaian tersebut menurun dari capaian tahun sebelumnya sebesar 100,00%. Sedangkan bila dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian tahun 2023 mencapai 111,38% dari target tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 89%.

Tabel 17. Perbandingan Capaian Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Itjen KKP Tahun 2023 dengan Capaian Tahun 2022 dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Mitra Inspektorat V	87%	100%	114,94%	88%	99,13%	112,65%	89%	99,13%	111,38%

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan diperlukan dukungan dan komitmen dari seluruh aparatur pengawasan Itjen dalam mengimplementasikan pengendalian secara berjenjang. Lebih lanjut, Inspektorat V akan terus melakukan evaluasi atas implementasi Kendali Mutu Pengawasan secara periodik untuk menjaga pelaksanaan dan pelaporan pengawasan tetap sesuai dengan standar mutu pengawasan.

#### **IKU-14. Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Mitra Inspektorat V (Itjen KKP)**

Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKP) adalah persentase kesesuaian pelaksanaan penugasan pengawasan dengan PKPT yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023, tingkat kepatuhan pelaksanaan PKPT ditargetkan sebesar 80% dari seluruh kegiatan pengawasan yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil evaluasi dan pengelolaan data, diketahui bahwa tingkat kepatuhan terhadap PKPT tahun 2023 sebesar 93,97% atau 117,46% dari target 80%. Capaian ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian tahun lalu sebesar 92,74% atau 115,93%. Perlu disampaikan bahwa target IKU ini ditetapkan pada angka yang sama setiap tahunnya (*stabilized*) sehingga bila dibandingkan dengan target jangka menengah Tahun 2024 kondisinya akan sama dengan capaian tahun 2022 mencapai 117,46%.

Tabel 18. Perbandingan Capaian Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat V Tahun 2023 dengan Capaian Tahun 2022 dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat V	80%	92,74%	115,93%	80%	93,97%	117,46%	80%	93,97%	117,46%

Dalam pelaksanaannya, capaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti adanya kebutuhan penyesuaian fokus pengawasan, munculnya isu strategis, dan perubahan kebijakan pimpinan.

### SS-3 Dukungan Internal Pengawasan yang Handal lingkup Inspektorat V

#### IKU-15. Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja Lingkup Inspektorat V

Persentase tingkat kepatuhan terhadap penganggaran dan pengukuran kinerja adalah tingkat kepatuhan terhadap penganggaran adalah kepatuhan unit kerja Inspektorat lingkup Itjen KKP didalam menyampaikan rencana operasional kegiatan (ROK) bulanan yang akan dilaksanakan kepada Sekretariat Itjen KKP, dan tingkat kepatuhan terhadap pengukuran kinerja adalah tingkat kepatuhan Inspektorat lingkup Itjen dalam pengukuran kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja. Ukuran capaian berdasarkan:

1. tingkat kepatuhan terhadap penganggaran dihitung dari jumlah ROK yang disampaikan kepada Sekretariat Itjen KKP setiap bulan.
2. tingkat kepatuhan terhadap pengukuran kinerja diukur dari kepatuhan pengukuran kinerja menggunakan aplikasi dan ketersediaan Laporan Kinerja setiap triwulan.

Berdasarkan hasil pengelolaan data, diketahui bahwa tahun 2023 tingkat kepatuhan pengukuran kinerja telah terlaksana sesuai target 100% dan capaian ini sama dengan tahun lalu yang mencapai 100,00. Perlu disampaikan bahwa target IKU ini ditetapkan pada angka yang sama setiap tahunnya (*stabilized*) sehingga bila dibandingkan dengan target jangka menengah (Tahun 2024) kondisinya akan sama dengan capaian tahun 2023.

Tabel 19. Perbandingan Capaian Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja Lingkup Inspektorat V Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja Lingkup Inspektorat V	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Hal yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan kinerja yaitu terkait administrasi pengelolaan kearsipan yang masih terkendala sarana dan prasarana serta SDM yang belum tersedia.

### **IKU-16. Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat V**

Persentase tingkat kepatuhan terhadap penganggaran dan pengukuran kinerja adalah tingkat kepatuhan terhadap penganggaran adalah kepatuhan unit kerja Inspektorat lingkup Itjen KKP didalam menyampaikan rencana operasional kegiatan (ROK) bulanan yang akan dilaksanakan kepada Sekretariat Itjen KKP, dan tingkat kepatuhan terhadap pengukuran kinerja adalah tingkat kepatuhan Inspektorat lingkup Itjen dalam pengukuran kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja. Ukuran capaian berdasarkan tingkat kepatuhan terhadap penganggaran dihitung dari ketertiban dalam pertanggungjawaban keuangan dan penyerapan realisasi anggaran.

Berdasarkan hasil pengelolaan data, diketahui bahwa tahun 2023 tingkat kepatuhan penganggaran telah terlaksana sesuai target 100% dan capaian ini sama dengan tahun lalu yang mencapai 100,00. Perlu disampaikan bahwa target IKU ini ditetapkan pada angka yang sama setiap tahunnya (*stabilized*) sehingga bila dibandingkan dengan target jangka menengah (Tahun 2024) kondisinya akan sama dengan capaian tahun 2023.

Tabel 20. Perbandingan Capaian Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja Lingkup Inspektorat V Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat V	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Hal yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan anggaran yaitu terkait administrasi pengelolaan keuangan yang masih terdapat kurang telitian dalam kelengkapan berkas pertanggungjawaban.

## **C. ANALISIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN**

### **1. Realisasi Anggaran Kegiatan**

Program Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Dengan Tujuan Tertentu pada Pelaksana Pembangunan KP dan Pengawasan pada unit kerja Mitra Inspektorat V dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya anggaran sebesar Rp4.450.029.973 atau 99,99% dari pagu Rp4.450.229.000.

Bila dibandingkan dengan tingkat realisasi anggaran sebelumnya, capaian realisasi anggaran tahun 2023 sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang mencapai



mencapai Rp4.031.790.898 atau 99,92 dari pagu Rp4.035.020.000. Perbandingan jumlah dan realisasi anggaran Itjen KKP Tahun 2022-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 21. Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat V Itjen KKP TA 2022-2023

Tahun	Pagu	Realisasi	
		Nilai	%
2022	4.035.020.000	4.031.790.898	99,92
2023	4.450.229.000	4.450.029.973	99,99

Sisa anggaran TA 2023 sebesar Rp199.027 atau 0,01% dari pagu. Adanya sisa anggaran tersebut berasal dari sisa belanja kegiatan perjalanan biasa, perjalanan dalam kota, belanja paket meeting, belanja jasa profesi, dan belanja bahan.

Dengan realisasi anggaran sebesar 99,99% dari pagu yang dialokasikan, seluruh *output* kegiatan berupa Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat V dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu lingkup KKP dapat tercapai secara optimal (100%).

## 2. Realisasi Anggaran Sasasaran Strategis

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, upaya untuk mewujudkan tujuan Inspektorat V Itjen KKP pada tahun 2023 dilaksanakan melalui pencapaian tiga Sasaran Strategis (SS) yang diukur keberhasilannya dengan 16 indikator kinerja. Sebagai implementasi kinerja berbasis anggaran, maka anggaran operasional Inspektorat V dirancang untuk mencapai target seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai parameter tercapainya SS dan tujuan. Namun, perlu disampaikan bahwa pola rancangan anggaran Inspektorat V dalam mencapai target indikator kinerja memiliki karakteristik tersendiri. Sebagai pengawas intern, kegiatan utama yang dilaksanakan Inspektorat V berupa aktivitas pengawasan terhadap kinerja mitra dengan hasil (*output*) berupa Laporan Hasil Pengawasan yang berisi mengenai permasalahan dan rekomendasi perbaikan bagi mitra kerja dan KKP. Dalam hal ini, kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat V dapat memiliki ruang lingkup yang meliputi pengawasan pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, akuntabilitas manajemen kinerja, reformasi birokrasi, penanganan pengaduan, audit investigasi, penilaian pembangunan zona integritas, dan tema lainnya. Oleh karena itu, kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat V memungkinkan untuk mendukung pencapaian beberapa indikator kinerja yang berbeda pada ketiga SS.

Informasi keuangan terkait dengan pencapaian Sasaran Kinerja (strategis) Inspektorat V tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 22. Pagu dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Kinerja Inspektorat V Tahun 2023

SASARAN KINERJA	KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	
			Rp	%
1. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Mitra Inspektorat V 2. Pengawasan Intern yang Handal pada Mitra Inspektorat V 3. Dukungan Internal Pengawasan yang Handal lingkup Inspektorat V	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Dengan Tujuan Tertentu pada Pelaksana Pembangunan KP dan Pengawasan pada unit kerja Mitra Inspektorat V	4.035.020.000	4.031.790.898	99,99
<b>TOTAL</b>		4.450.229.000	4.450.029.973	99,99

### 3. Analisis Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktifitasnya. *Value for money* merupakan salah satu indikator kinerja sebuah organisasi sektor publik yang memberikan informasi apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya. Indikator yang dimaksud adalah ekonomis, efisien, dan efektif. Pengukuran kinerja *Value for money* dapat membuat keseimbangan antara pengukuran hasil dengan pengukuran proses. Indikator efektivitas dalam *Value for money* berorientasi pada hasil dan lebih bersifat kualitatif, sedangkan indikator ekonomis dan efisiensi lebih berorientasi pada proses dan lebih bersifat kuantitatif. Konsep pokok *value for money* antara lain:

1. Ekonomis: pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomis terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
2. Efektivitas: tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.
3. Efisiensi: pencapaian output yang optimal dengan input tertentu atas penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Dalam hal ini, efisiensi merupakan perbandingan realisasi output dengan input (anggaran) yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

Dengan mengacu pada konsep dan kriteria di atas, dapat disampaikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk mendukung tugas dan fungsi Inspektorat V telah dikelola dengan ekonomis, efektif dan efisien dengan penjelasan sebagai berikut:

#### 1. Ekonomis

Pengelolaan anggaran Inspektorat V telah dilaksanakan secara ekonomis mulai dari tahap perencanaan. Penyusunan anggaran dilaksanakan dengan mengacu kepada sasaran dan target kinerja Inspektorat V yang dirumuskan untuk menjawab

kebutuhan KKP, mitra kerja, dan internal Inspektorat V. Dalam prosesnya, penyusunan anggaran Inspektorat V juga telah melalui proses rewiu yang dilaksanakan oleh auditor internal yang ditugaskan untuk memastikan rancangan anggaran telah sesuai dengan sasaran dan target kinerja, ketentuan yang berlaku, dan ekonomis. Selain itu, dalam penyusunan rencana kegiatan pengawasan, Inspektorat V menggunakan pendekatan pengawasan berbasis risiko sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat V menjadi lebih fokus dan tepat sasaran. Selanjutnya, dalam tahap pelaksanaan, pengelolaan anggaran Inspektorat V diawasi secara berkala oleh auditor internal untuk memastikan organisasi mendapatkan barang, jasa, dan SDM kualitas terbaik dengan biaya sekecil mungkin.

## 2. Efektif

Berdasarkan pengukuran kinerja tahun 2023, diketahui bahwa dari 16 IKU yang ditetapkan sebagai hasil program, sebanyak 11 IKU dapat dicapai melebihi target dan 5 IKU lainnya tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Dengan capaian IKU tersebut, nilai pencapaian sasaran dan terget kinerja Inspektorat V tahun 2023 yang ditunjukkan dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) mencapai 106,56% atau diatas target yang diharapkan. Dengan membandingkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan pada tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan anggaran program pengawasan intern terkelola dengan efektif. Tercapainya tingkat efektivitas kinerja tersebut tidak lepas dari adanya pengendalian proses pencapaian target kinerja yang dilaksanakan secara sistematis dan periodik oleh pimpinan beserta tim pengelola kinerja Itjen.

## 3. Efisien

Tingkat efisiensi atas pelaksanaan anggaran program pengawasan Inspektorat V tahun 2023 dapat dilihat dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja yang meliputi capaian *output* dan capaian kinerja organisasi (NPSS). Secara keseluruhan, pengelolaan anggaran Inspektorat V dalam mendukung pencapaian kinerja tahun 2023 dapat dinilai efisien karena dengan dengan *input* anggaran yang lebih kecil (99,99%) dapat dihasilkan kinerja yang sesuai dan melebihi target (100%). Rincian efisiensi anggaran per jenis capaian kinerja disampaikan sebagai berikut:

### a. Efisiensi Capaian Kinerja *Output*

Berdasarkan perbandingan antara realisasi anggaran dengan *output* yang dihasilkan, diketahui bahwa realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 99,99%

sedangkan capaian *output* mencapai 100% sehingga terdapat efisiensi sebesar 0,01% dalam menghasilkan *output* dengan optimal.

b. Efisiensi Capaian Kinerja Organisasi

Bila dibandingkan dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) yang merupakan rata-rata capaian kinerja organisasi tahun 2023, diketahui bahwa sumber daya anggaran Inspektorat V digunakan secara efisien karena dengan *input* anggaran yang lebih kecil (99,99%) dapat menghasilkan kinerja yang melebihi target (NPSS: 106,56%). Dengan demikian, efisiensi anggaran atas pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan (NPSS) sebesar 6,57%.

Tabel 23. Efisiensi Anggaran Inspektorat V Tahun 2023 Per Jenis Capaian Kinerja

<b>Realisasi Anggaran (<i>Input</i>)</b>	<b>Realisasi Hasil</b>		<b>Efisiensi</b>
99,99% Dari alokasi anggaran Rp4.450.229.000	Output	100%	0,01%
	Kinerja Organisasi (NPSS)	106,56%	6,57%

Pencapaian efisiensi anggaran tersebut merupakan hasil dari optimalisasi hari pengawasan dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan dan penerapan pengawasan berbasis resiko yang memungkinkan pengawasan Inspektorat V lebih tepat sasaran.

## **BAB 4**

### **PELAPORAN HASIL PENGAWASAN**

#### **A. PENGAWASAN MITRA INSPEKTORAT V (ITJEN KKP)**

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengawasan terhadap mitra inspektorat V antara lain:

##### **1. Evaluasi Kepegawaian di Itjen KKP**

Hasil evaluasi pengawasan kepegawaian terdapat beberapa permasalahan, antara lain:

- a) Pelaksanaan pengembangan kompetensi jabatan belum sesuai ketentuan;
- b) Belum terdapat mekanisme seleksi formasi jabatan non auditor yang kosong pada inspektorat jenderal;
- c) Terdapat pejabat fungsional yang belum menjadi anggota organisasi profesi ;
- d) Dokumen analisis jabatan dan peta jabatan tahun 2023 belum disusun

Terhadap permasalahan di atas, telah direkomendasikan kepada Sekretaris Itjen agar:

- a) Menginstruksikan kepada para pegawai lingkup Itjen KKP supaya mengikuti pengembangan hingga tercapai minimal 20 JP/tahun/pegawai.
- b) Ketua Tim Kerja Sumber Daya Aparatur Itjen KKP untuk Menyusun analisis kesenjangan kompetensi pegawai Tahun 2023 mengacu kepada standar kompetensinya dan menjadikannya sebagai dasar dalam rencana Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Tahun 2024.
- c) Menyusun kebijakan lingkup Inspektorat Jenderal terkait Seleksi Peserta yang mengikuti uji kompetensi serta Seleksi Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Tertentu.
- d) Berkoordinasi secara tertulis kepada Biro Keuangan dan Biro SDM atas hasil perhitungan terbaru atas ABK PK APBN Mahir Tahun 2023.
- e) Menginstruksikan kepada Ketua Tim Kerja Sumber Daya Manusia Aparatur Itjen KKP agar melakukan sosialisasi terkait kewajiban sebagai anggota organisasi profesi JF.
- f) Menginstruksikan pejabat fungsional tertentu agar terdaftar sebagai anggota profesi pada instansi pembina masing-masing.
- g) Menginstruksikan Tim kerja Hukum, Organisasi dan Kerja Sama untuk menyusun dokumen Analisis Jabatan Tahun 2023 dengan berkoordinasi dengan Biro SDMAO KKP dan Peta Jabatan Tahun 2023 sesuai dengan ABK Tahun 2023.

2. Pengawasan terhadap Kepatuhan terhadap Kendali Mutu Pengawasan tahun 2023. Kegiatan yang dilaksanakan adalah evaluasi terhadap kendali mutu pengawasan Semester I dan II 2023. Hasil evaluasi Semester I 2023 terhadap kepatuhan penyusunan KMP, Inspektorat Jenderal dan auditornya telah memenuhi kewajiban profesionalnya, yaitu tingkat pemenuhan KMP mencapai 97,68% dan substansi mencapai 92,99%. Rata-rata pemenuhan dan substansi KMP Semester I Tahun 2023 mencapai 95,13%. Capaian tersebut telah memenuhi target IKU Tahun 2023 sebesar 88%. Evaluasi kepatuhan kendali mutu Semester II tahun 2023 masih dalam proses penyelesaian. Permasalahan yang ditemukan adalah (1) Pemenuhan kualitas KMP belum sepenuhnya optimal disebabkan auditor kurang cermat dalam menyusun KMP. Telah direkomendasikan kepada Inspektur I-V agar menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh auditor Inspektorat I-V agar lebih cermat dalam menyusun KMP.
3. Rekomendasi Kebijakan Itjen KKP.

Pada tahun 2023, Inspektorat V telah melaksanakan kegiatan terkait rekomendasi kebijakan lingkup Itjen KKP, yaitu terkait Pemantauan implementasi SIMWAS dan Kebijakan Penyelenggaraan Kearsipan Tahun 2023 pada Itjen KKP.

  - a) Pemantauan Implementasi SIMWAS.

Pada Semester I 2023, Inspektorat V telah melaksanakan pemantauan implementasi SIMWAS. Permasalahan terkait implementasi SIMWAS antara lain (a) SIMWAS belum memiliki payung hukum, (b) Status BMN SIMWAS belum jelas disebabkan anggaran penyelenggaraan SIMWAS berasal dari anggaran rapat dan jasa profesi sehingga belum diketahui metode penghitungan pembentukan nilai asset, (c) Pengembangan/simplifikasi SIMWAS dan integrasi aplikasi internal belum terealisasi sesuai rencana aksi, (d) Pengembangan pegawai terkait penguasaan web development belum dilaksanakan serta uji coba SIMWAS belum dilakukan untuk menu pelaporan dan evaluasi, (d) Kerja berbasis sistem informasi belum menjadi budaya kerja di lingkungan Itjen KKP.

Sehubungan hasil diatas, telah direkomendasikan kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal selaku Penanggung Jawab SIMWAS agar:

    - 1) Menyusun payung hukum penyelenggaraan SIMWAS;
    - 2) Menyusun kajian terkait kepastian status SIMWAS sebagai aset atau bukan asset;
    - 3) Mereviu SK Tim Pengembangan SIMWAS dengan mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan tugas Tim tersebut;
    - 4) Mengusulkan pegawai untuk mengikuti Diklat terkait web development;
    - 5) Menyiapkan infrastruktur SIMWAS berupa dokumen Proses Bisnis dan Kerangka Acuan Kerja;

- 6) Menyempurnakan fitur aplikasi SIMWAS antara lain fitur KM, fitur revisi PKPT, penambahan menu pelaporan dan evaluasi serta mengupayakan penambahan fitur tanda tangan elektronik bersertifikasi BSRé;
  - 7) Melaksanakan kampanye budaya kerja berbasis sistem informasi;
  - 8) Menyurati Inspektur I s.d. V untuk menyelesaikan pengunggahan seluruh Program Kerja Pengawasan pada SIMWAS.
4. Kebijakan Penyelenggaraan Kearsipan Tahun 2023 pada Itjen KKP.

Pada semester II 2023 Inspektorat V melakukan kajian mengenai penyelenggaraan kearsipan di Itjen KKP. Terdapat beberapa permasalahan mengenai kearsipan yang memerlukan tindak lanjut, antara lain 1) Dalam SOP belum terdapat klausul yang mengatur tentang pengelolaan arsip hasil pengawasan bersifat rahasia, misalnya hasil Audit Investigasi atau Audit dengan Tujuan Tertentu; serta masih menggunakan nomenklatur jabatan lama yang sudah dihapuskan, 2) seluruh Arsiparis di Itjen KKP belum mengikuti diklat teknis atau pengembangan kompetensi lainnya, 3) arsip dinamis (arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip) berupa kertas kerja pengawasan disimpan oleh Tim pelaksana pengawasan. Di samping itu dokumen pendukung kertas kerja pengawasan disimpan pada media penyimpanan antara lain berupa laptop/computer inventaris kantor dan media penyimpanan digital milik pihak ketiga misalnya *Google Drive* pribadi, *Google Drive* atas nama Tim atau atas nama satuan kerja objek pengawasan.

Sehubungan kondisi tersebut disampaikan rekomendasi kebijakan kepada Sekretaris Itjen KKP agar: 1. Mereviu SOP terkait kearsipan/pengelolaan persuratan dengan memuat substansi terkait hasil pengawasan bersifat rahasia dan pembaruan nomenklatur pelaksana SOP; 2. Menunjuk Arsiparis sesuai jumlah Unit Kerja lingkup Itjen KKP; 3. Mengupayakan diklat teknis atau pengembangan kompetensi lainnya bagi pejabat fungsional Arsiparis lingkup Itjen KKP; 4. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka peningkatan pengelolaan arsip di Itjen KKP terutama terkait dengan rencana pengembangan aplikasi e-Layar; dan 5. Mereviu kelayakan media penyimpanan kertas kerja pengawasan dan dokumen pendukungnya

5. Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Itjen KKP

Hasil Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan pada Itjen KKP, sebagai berikut:

- a) Pada kegiatan *fullboard meeting*, undangan yang ditanggung oleh panitia tidak sesuai dengan anggaran yang tersedia, dimana jumlah undangan lebih besar dibandingkan anggaran, tidak ada pembagian yang jelas biaya ditanggung panitia dan biaya yang ditanggung peserta;
- b) Administrasi pertanggungjawaban keuangan perjalanan dinas belum ditandatangani oleh pelaksana perjalanan dinas;

- c) Kegiatan Asistensi Pengelolaan Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen belum memperhatikan hasil pengelolaan database pada aplikasi SIDAK secara optimal;
- d) Implementasi SOP Pengajuan SPP-SPM LS Bendahara belum optima karena belum dilakukan monitoring dan belum seluruhnya dilengkapi lembar SPP-SPM. Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah direkomendasikan kepada Sekretaris Itjen dan seluruh PPK lingkup Itjen agar:
  - a) Lebih cermat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, selektif dalam melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, dan halfday) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik negara;
  - b) Mengingat BPP dan pelaksana perjalanan dinas terkait supaya melaksanakan mekanisme penandatanganan SPJ perjalanan dinas rampung. dengan tertib;
  - c) Membuat kartu kendali Pengajuan SPP-SPM LS Bendahara dan menginstruksikan BPP agar lebih cermat dalam menyusun dokumen pertanggungjawaban SPP-SPM LS, khususnya melampirkan dokumen SPP dalam setiap pertanggungjawaban;
  - d) Sekretaris Inspektorat Jenderal agar menyusun kriteria penetapan lokasi kegiatan Asistensi Pengelolaan Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen secara rinci dan jelas.

## **B. PENGAWASAN PEMBANGUNAN INTEGRITAS**

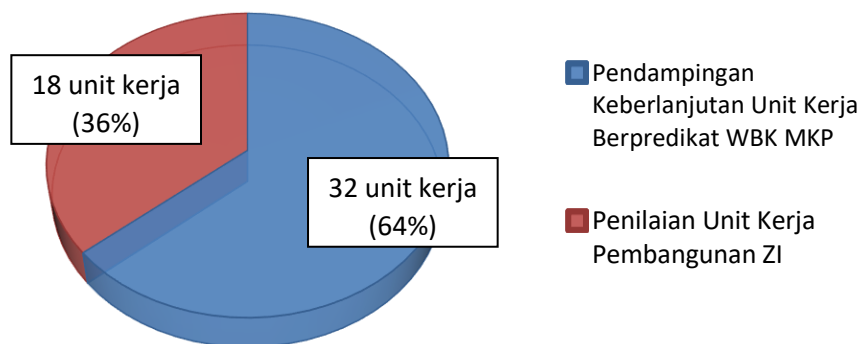
Pembangunan integritas merupakan kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta memberikan pelayanan publik yang prima dan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pembangunan integritas sebagai strategi preventif dalam upaya pencegahan *fraud* dengan membangun kesadaran pola pikir dan budaya kerja antikorupsi, perbaikan sistem, dan deteksi awal (*early warning*) melalui manajemen risiko KKN, dinilai lebih efektif mencegah terjadinya kecurangan yang berdampak pada kerugian negara. Untuk itu, dalam mewujudkan pembangunan integritas di lingkungan KKP, pada Tahun 2023 ini terdapat 3 (tiga) program utama pengawasan pembangunan integritas yang dilaksanakan oleh Inspektorat V yaitu Pengawasan Pembangunan Zona Integritas, Pembangunan Integritas Kolaboratif, dan Program Edukasi Antikorupsi, sebagai berikut:

### **1. Pembangunan zona integritas.**

Pembangunan zona integritas terinspirasi dari konsep "*island of integrity*" yaitu suatu kondisi dimana unit kerja instansi pemerintah memiliki imunitas dan mampu memberikan tata kelola yang terbaik meskipun instansi pemerintah disekitarnya didominasi oleh manajemen dan tata kelola yang buruk. Permen KP 49 Tahun 2021



tentang Pembangunan Integritas di lingkungan KKP mengamanatkan pembangunan Zona Integritas (ZI) pada tiap unit kerja. Selama Tahun 2023 telah dilakukan 50 kegiatan pendampingan, pemantauan dan penilaian pembangunan ZI dengan komposisi sebagaimana pada Gambar 3.



Gambar 3. Diagram Komposisi Kegiatan Pembangunan Zona Integritas

- a) Pendampingan Keberlanjutan Pembangunan ZI pada unit kerja yang telah berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) KKP

Pada Februari s.d. Mei 2023, Inspektorat V telah melakukan pendampingan dalam rangka mengevaluasi dan menilai perkembangan keberlanjutan 32 unit kerja yang telah mendapat predikat menuju WBK dari MKP sekaligus proses seleksi usulan penilaian nasional mengacu PermenPAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah.

Hasil kegiatan ini diperoleh sebanyak 20 unit kerja telah meningkatkan kualitas pembangunan ZI utamanya dari sisi inovasi pelayanan publik yang berdampak pada masyarakat, transformasi digital, dan peran agen perubahan dalam mendukung budaya kerja berintegritas, dengan 1 (satu) unit kerja diantaranya berhasil memperoleh predikat WBK dari Menteri PAN RB, rekapitulasi 20 unit kerja tersebut sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel 24. Daftar 20 Unit Kerja yang Meningkatkan Kualitasnya dan diusulkan TPN

No	Nama Unit Kerja	Nilai
1	BPSPL Padang	93.31
2	PPN Prigi	91.37
3	Balai KIPM Ambon	89.21
4	Balai KIPM Mataram	88.90
5	Stasiun KIPM Yogyakarta	88.30
6	Balai KIPM Medan I	88.05
7	BPPA Sukamandi	88.03
8	Balai KIPM Surabaya II	87.88

No	Nama Unit Kerja	Nilai
9	PPN Palabuhanratu	87.76
10	Balai KIPM Balikpapan (WBK Nasional)	87.50
11	BPBAT Mandiangin	87.41
12	Stasiun KIPM Pekanbaru	87.17
13	Pangkalan PSDKP Jakarta	86.20
14	Balai Besar KIPM Jakarta I	86.15
15	Stasiun PSDKP Tahuna	85.81
16	LPSPL Serang	85.68
17	BPBAT Sungai Gelam	85.59
18	PPS Cilacap	85.56
19	Balai KIPM Banjarmasin	85.35
20	Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu	84.03

Adapun 12 unit kerja lainnya meskipun masih konsisten melanjutkan pembangunan ZI namun masih terdapat kendala yang cukup berpengaruh terhadap kualitasnya dan diperlukan upaya perbaikan, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 25. Daftar 12 Unit Kerja yang belum dapat diusulkan TPN

No	Unit Kerja	Permasalahan
1	BPBAP Situbondo	Nilai Survei Persepsi Antikorupsi tidak mencapai ambang batas
2	Stasiun KIPM Cirebon	Inovasi belum dapat diukur manfaat dan dampaknya bagi pengguna jasa
3	Stasiun KIPM Batam	Tindak lanjut temuan BPK belum tuntas 100%
4	Balai KIPM Tarakan	Penurunan komitmen dan partisipasi aktif dari seluruh pegawai dalam pelaksanaan pembangunan ZI
5	Biro Umum dan PBJ	Standar pelayanan publik dan Survei Kepuasan Masyarakat masih sebatas layanan klinik, belum terhadap pelayanan lainnya
6	BPBL Batam	Hasil survey Persepsi Antikorupsi terdapat catatan responden yang memberatkan
7	Stasiun PSDKP Tarakan	Belum terdapat inovasi layanan yang berbeda dengan unit kerja lainnya
8	BPSPL Denpasar	Tindak lanjut temuan pengawasan internal belum tuntas 100%
9	BPSPL Makassar	Terdapat kenaikan pelanggaran disiplin pegawai dibandingkan tahun sebelumnya
10	PPN Pekalongan	Terdapat pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin namun belum diberikan sanksi
11	Pangkalan PSDKP Tual	Capaian kinerja tidak lebih baik dari tahun sebelumnya
12	Balai Besar KIPM Makassar	Capaian kinerja tidak lebih baik dari tahun sebelumnya

b) Penilaian Pembangunan ZI menuju WBK KKP

Inspektorat V selaku Tim Penilai Internal (TPI) telah melaksanakan kegiatan penilaian Pembangunan ZI dalam rangka penetapan predikat WBK dari MKP terhadap 18 unit kerja yang diusulkan oleh 7 (tujuh) Unit Eselon I lingkup KKP meliputi tahapan penilaian lapangan mulai Juli s.d. September 2023 dilanjutkan dengan Rapat Pleno TPI pada awal Oktober 2023.

Hasil penilaian oleh TPI sebanyak 14 unit kerja telah memenuhi syarat dan dinyatakan lulus meraih predikat WBK dari Menteri KP berdasarkan Kepmen KP Nomor 189 Tahun 2023 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Lingkungan KKP Tahun 2023. Sedangkan sebanyak 4 (empat) unit kerja lainnya dinyatakan tidak lulus karena tidak memenuhi syarat nilai total minimal 75 dan/atau nilai setiap komponen pengungkit minimal 60%. Rekapitulasi hasil pleno TPI sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 26. Hasil Pleno Penilaian Pembangunan ZI menuju WBK KKP Tahun 2023

No.	Nama Unit Kerja	Nilai Komponen Pengungkit						Nilai Komponen Hasil	Nilai Total
		Manajemen Perubahan	Penataan Tata Laksana	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Pengutan Akuntabilitas	Pengutan Pengawasan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
	LULUS:								
1.	SKIPM Medan II	85,78	78,00	84,42	88,39	79,42	75,03	96,06	87,44
2.	BPPP Ambon	84,47	70,26	85,53	85,53	72,70	91,83	92,39	86,52
3.	Stasiun PSDKP Biak	90,07	61,93	85,05	100,00	73,11	77,92	93,92	86,37
4.	SKIPM Pangkalpinang	69,55	62,69	81,58	95,31	77,90	77,08	96,17	85,50
5.	PPN Tanjung Pandan	74,05	69,07	89,83	86,72	91,42	70,67	88,23	84,49
6.	BPBAP Takalar	80,67	72,81	88,31	83,19	71,11	82,03	89,44	83,35
7.	PPP Teluk Batang	87,48	61,55	96,48	86,17	83,35	66,21	86,20	83,18
8.	Stasiun PSDKP Ambon	88,34	61,55	81,87	86,72	69,61	77,88	88,94	82,04
9.	Poltek KP Pangandaran	83,42	73,45	74,10	71,57	74,18	80,81	90,80	81,91
10.	SKIPM Merak	72,66	66,69	65,27	88,14	67,91	87,25	92,28	81,65
11.	Poltek KP Sidoarjo	63,27	63,33	60,83	78,79	77,68	86,98	92,50	80,81
12.	Direktorat Pemasaran	73,16	78,21	62,16	73,89	63,47	82,63	93,81	80,24
13.	Balai KIPM Lampung	67,62	63,88	86,23	74,81	65,80	82,37	90,09	80,13

No.	Nama Unit Kerja	Nilai Komponen Pengungkit						Nilai Komponen Hasil	Nilai Total
		Manajemen Perubahan	Penataan Tata Laksana	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Penguatan Akuntabilitas	Penguatan Pengawasan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
14.	BPBAP Ujung Batee	67,71	66,90	81,52	82,21	62,31	77,63	89,66	79,44
	TIDAK LULUS:								
15.	SKIPM Bandung	59,35	65,45	68,39	72,91	63,14	79,65	92,89	78,05
16.	BPPP Bitung	73,23	59,76	67,49	72,41	57,24	62,40	88,28	74,17
17.	Poltek KP Bitung	25,28	49,00	64,33	79,91	23,33	67,88	92,83	67,30
18.	SKIPM Aceh	7,25	23,43	66,35	85,79	61,86	56,23	86,64	66,99

Beberapa permasalahan atau hal-hal yang masih menjadi kelemahan dalam pelaksanaan pembangunan ZI pada unit kerja di lingkungan KKP sebagai berikut:

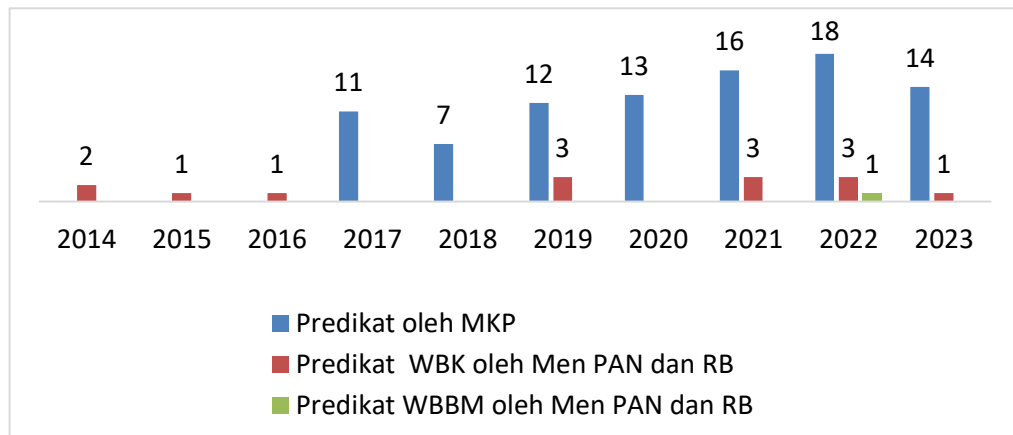
- 1) Tim penilai nasional masih memerlukan bukti dukung yang lebih memadai terkait pelaksanaan monev pembangunan ZI, pemetaan benturan kepentingan belum diimplementasikan dalam aktifitas yang mampu mendorong percepatan penanganannya, serta risiko pelayanan dan integritas belum termitigasi dengan baik dan/atau belum sepenuhnya menjawab kinerja utama dan isu strategis yang dihadapi unit kerja.
- 2) Tim penilai internal masih menemukan kelemahan pada unit kerja yang dinyatakan tidak lulus diantaranya belum terlihat adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang konkrit, pelaksanaan monev pembangunan ZI yang masih formalitas, tidak dilakukan reviu SOP layanan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, manajemen SDM dan pengawasan termasuk manajemen risiko dan SPI belum memadai, dan belum menunjukkan inovasi pelayanan yang berdampak bagi masyarakat.

Atas hasil kegiatan tersebut telah disampaikan saran perbaikan di setiap area perubahan pada unit kerja yang dinilai, selain itu TPI juga mendorong penguatan komitmen pimpinan sebagai *role model* dalam mengupayakan peningkatan kualitas pembangunan ZI dengan melibatkan seluruh pegawai dalam pelaksanaannya.

### 3) Capaian Akumulatif Pembangunan ZI Tahun 2014-2023

Sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2023, capaian jumlah unit kerja berpredikat WBK/WBBM di Lingkungan KKP sebanyak 98 unit kerja atau 50% dari total 196 unit kerja KKP yang terdiri dari 1 (satu) unit kerja mendapat

predikat menuju WBBM Nasional dan 13 unit kerja mendapat predikat menuju WBK Nasional serta 84 unit kerja lainnya mendapat predikat menuju WBK Internal dari Menteri KP, sebagai berikut:



Gambar4. Capaian Predikat WBK Tahun 2014 s.d. 2023

c) Dampak Pengawasan Pembangunan Zona Integritas

Dampak pengawasan pembangunan ZI di lingkungan KKP yaitu pelayanan publik yang prima dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Hal tersebut menjadikan KKP mendapat predikat Pelayanan Publik A (Pelayanan Prima) dari KemenPAN-RB, kemudian Opini Kualitas Layanan Tertinggi pada KKP dari Ombudsman RI, serta Mendukung capaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (3,440) dalam penilaian Maturitas SPIP serta Reformasi Birokrasi. Selain itu, dengan kondisi pelayanan publik tersebut mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di KKP.

2. Pembangunan **Integritas Kolaboratif**

Pembangunan integritas menjadi program nasional yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi. Komitmen tinggi KKP dalam pembangunan integritas dibuktikan dengan kolaborasi pelaksanaan program dengan unit kerja, *stakeholder* dan instansi lain. Sepanjang Tahun 2023, telah dilakukan 35 kegiatan yang dibagi dalam 5 program yaitu: 16 kegiatan penilaian implementasi pengendalian gratifikasi, 13 kegiatan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK, 4 (empat) kegiatan pemantauan pelaksanaan aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) lingkup KKP setiap triwulan, 1 (satu) kegiatan pemantauan Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) lingkup KKP, dan 1 (satu) kegiatan pemantauan implementasi Permen KP 49 Tahun 2021 tentang pembangunan integritas pada Biro SDMAO selaku penanggung jawab pelaksanaan, dengan hasil sebagai berikut:

a. Penilaian Implementasi Pengendalian Gratifikasi

Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pembangunan sistem antikorupsi di lingkungan KKP, Inspektorat V pada Tahun 2023 mengadakan penilaian implementasi program pengendalian gratifikasi yang telah dilakukan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan KKP sebagai dasar pemberian penghargaan bagi UPG berkinerja terbaik.

Kegiatan ini didahului dengan penyampaian informasi kepada seluruh unit eselon I perihal rencana penilaian kinerja UPG berikut kriteria penilaiannya melalui Nota Dinas Inspektur V Nomor 71/ITJ.5/KP.750/I/2023, tanggal 31 Januari 2023, serta penyebaran *flyer* melalui WAG UPG KKP pada tanggal 7 Februari 2023 dan 6 September 2023. Pelaksanaan penilaian dilaksanakan pada Bulan November 2023 terhadap 16 UPG unit kerja yang telah mengunggah bukti dukung implementasi pengendalian gratifikasi.

Kriteria Penilaian UPG Terbaik didasarkan pada kompetensi dan keaktifan UPG dalam *public campaign* termasuk menjadi narasumber pencegahan gratifikasi di forum publik, juga terhadap pengelolaan pelaporan peristiwa gratifikasi baik pencatatan maupun kepatuhan penyampaian laporan berkala kepada UPG Eselon I dan/atau KKP.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap 16 UPG diketahui sebanyak 5 dari 16 unit kerja (31,25%) yang melaksanakan pengendalian gratifikasi secara aktif dengan indikator nilai total diatas 60 sebagaimana berikut



No	Unit Kerja	Nilai
1	BBKIPM Makassar	78.40
2	BPPP Ambon	77.85
3	SKIPM Cirebon	72.55
4	BPSPL Makassar	72.55
5	BPBAT Mandiangin	68.75

Memperhatikan rendahnya prosentase keaktifan UPG maka unit kerja di lingkungan KKP perlu meningkatkan kompetensi personil UPG antara lain melalui *e-learning* pengendalian gratifikasi yang dapat diakses secara *online* melalui website KPK dan meningkatkan pemahamannya terhadap ketentuan yang berlaku khususnya Permen KP Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengendalian

gratifikasi di lingkungan KKP, sehingga mampu berperan aktif menjadi narasumber untuk mensosialisasikan pengendalian gratifikasi dan anti korupsi dalam berbagai forum publik di lingkungan unit kerjanya.

Capaian kegiatan penilaian tersebut sebanyak 3 (tiga) unit kerja memperoleh penghargaan UPG Terbaik yaitu BBKIPM Makasar, BPPP Ambon dan SKIPM Cirebon, pada puncak peringatan Hari Anti Korupsi seDunia (HAKORDIA) KKP Tahun 2023 pada 11 Desember 2023.

- b. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Survei Penilaian Integritas KPK  
Setiap tahun KPK menyelenggarakan Survei Penilaian Integritas (SPI) K/L/D dan selama dua tahun terakhir nilai SPI KKP konsisten berada diatas nilai rata-rata nasional meskipun mengalami penurunan, yaitu Tahun 2021 memperoleh 83,1 (Nasional 72,4) dan Tahun 2022 memperoleh 80,32 (Nasional 71,94). SPI pada tahun ini telah dilaksanakan KPK pada 17 Juli s.d. 31 Oktober 2023 terhadap responden internal, eksternal, dan ekspert KKP. Inspektorat V turut mendampingi pemenuhan target responden dan pengisian survei telah mencapai 100% dari target yang ditetapkan oleh KPK. Hasil SPI Tahun 2023 akan dirilis pada Januari Tahun 2024.

Upaya peningkatan nilai SPI KKP selain melalui pembangunan ZI oleh unit kerja juga perlu menindaklanjuti rekomendasi hasil SPI KPK Tahun 2022. Dalam hal ini Itjen telah menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil SPI Tahun 2022 baik kepada KPK maupun kepada unit kerja lingkup KKP melalui Nota Dinas Inspektur V Nomor B.178/ITJ.5/KP.510/V/2023, tanggal 3 Mei 2023.

Selanjutnya, Inspektorat V telah melakukan kegiatan pemantauan atas realisasi Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil SPI KPK tersebut terhadap 13 unit kerja lingkup KKP pada bulan November 2023. Pemilihan unit kerja disesuaikan dengan kegiatan penilaian UPG dan Tim Penanganan Pengaduan sehubungan dengan keterbatasan personil, waktu dan anggaran.

Hasil pemantauan secara umum diketahui bahwa telah dilakukan tindak lanjut rekomendasi berupa upaya peningkatan prosedur layanan, SPBE, pemetaan benturan kepentingan, namun belum terlihat upaya terkait kampanye penegakan aturan yang menyangkut penyalahgunaan perjalanan dinas, mark up anggaran, penyalahgunaan PBJ dan honor kegiatan.

Atas permasalahan tersebut unit kerja di lingkungan KKP perlu melaksanakan intensifikasi dan sosialisasi penegakan aturan, serta pengendalian kecurangan/*anti fraud*, antara lain melalui identifikasi dan mitigasi risiko KKN baik dalam pelayanan publik maupun pelayanan internal perkantoran.

c. Pemantauan pelaksanaan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) lingkup KKP

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dalam pelaksanaannya dilakukan setiap 2 (dua) tahunan terbagi ke dalam beberapa Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) yang harus dipantau progres capaiannya dan dilaporkan secara berkala (triwulan) oleh Inspektorat V selaku *Focal Point* melalui aplikasi JAGA (<https://jaga.id/monitoring>) sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh Sekretariat Stranas PK.

Terkait hal tersebut KKP mendapatkan amanat sebagai pelaksana 5 Aksi PK, dengan hasil pemantauan sebagai berikut:

1) Aksi Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang melalui Pendekatan Kebijakan Satu Peta.

Pelaksana Aksi ini di KKP diampu oleh PUSDATIN dan Direktorat Perencanaan Ruang Laut. Berdasarkan verifikasi Tim Stranas PK capaian aksi tersebut pada B12 telah ditetapkan dalam status **selesai** dengan terbitnya Persetujuan Teknis (Pertek) Menteri KP yang berkaitan dengan penyusunan peraturan daerah mengenai integrasi rencana zonasi di tiga provinsi yaitu Provinsi NTT melalui Surat Nomor B.1686/MEN-KP/X/2023, Provinsi Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara melalui Surat Nomor B.1505/MEN-KP/IX/2023 dan B.1500/MEN-KP/IX/2023.

2) Aksi Penguatan Pengendalian Ekspor dan Impor.

Pelaksana Aksi ini di KKP diampu oleh Direktorat Jasa Kelautan Ditjen PKRL dan Direktorat Logistik Ditjen PDSPKP, dengan amanat Tersedianya SOP dan *Service Level Agreement* (SLA) dalam melakukan verifikasi untuk implementasi neraca komoditas perikanan dan garam; dan terimplementasikannya SOP dan SLA tersebut. Hingga periode B12 progres capaian pada Direktorat Logistik dalam proses menyusun SOP Verifikasi dan Penetapan Rencana Komoditas Perikanan, sedangkan untuk SLA masih menunggu revisi Permen KP 6/2023. Adapun Direktorat Jasa Kelautan masih berlanjut memetakan gudang-gudang garam yang ada sebagai basis penyusunan bisnis proses, sehingga dokumen SOP dan SLA belum tersedia.

3) Aksi Reformasi Tata Kelola Pelabuhan.

Pelaksana Aksi ini di KKP diampu oleh Unit-unit Pelaksana Teknis lingkup BPPMHKP yang hingga saat ini masih mengemban tugas perkarantinaan, dengan salah satu amanatnya Penerapan *National Logistic Ecosystem* (NLE) dalam rangka pemberian kepastian biaya logistik dan waktu layanan, dengan target *output*: "Digitalisasi Layanan untuk Percepatan Layanan dan Penguatan



Pengawasan” melalui penyatuan sistem informasi layanan Karantina, Bea Cukai, Imigrasi, Lembaga *National Single Windows* (LNSW), Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan PT Angkasa Pura, dan sudah diimplementasikan oleh UPT lingkup BPPMHKP. Unit kerja lingkup BPPMHKP tidak dapat menentukan target capaian per periode sehubungan pelaksana aksi bersifat kolaboratif meliputi Pelabuhan Umum (13 K/L), Pelabuhan Udara (12 K/L) dan Pelabuhan Khusus (9 K/L).

- 4) Aksi Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan untuk Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023 dan 2024.

Pelaksana Aksi ini di KKP diampu oleh Biro Perencanaan. Hasil verifikasi Tim Stranas PK pada periode B12 bahwa penyampaian data realisasi belum dilakukan berkala secara bulanan, termasuk data realisasi anggaran level komponen dan subkomponen pada aplikasi SAKTI dan substansi laporan realisasi P3KE belum memuat analisis mengenai efektivitas atas pelaksanaan program tersebut.

- 5) Aksi Perbaikan Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektivitas Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pelaksana Aksi ini di KKP diampu oleh Inspektorat Jenderal dan Biro Umum dan PBJ. Berdasarkan Surat Pimpinan KPK Nomor B/1835/GAH.00/10-16/04/2023, tanggal 10 April 2023, data capaian Aksi PK ini belum dapat dilakukan pelaporan sampai dengan tersusunnya pedoman audit/kertas kerja audit dan pengembangan sistem audit elektronik serta sosialisasi oleh tim BPKP dan LKPP.

Terhadap permasalahan yang masih dijumpai tersebut telah disarankan kepada:

- 1) Direktur Jasa Kelautan dan Direktur Logistik untuk segera menyusun dan/atau menetapkan SOP dan SLA dalam rangka penyederhanaan proses bisnis verifikasi neraca komoditas perikanan dan garam dalam SINAS NK, sebelum berakhirnya Triwulan I 2024 (B15).
- 2) Kepala UPT lingkup BPPMHKP untuk berkoordinasi dengan unit kerja instansi lainnya di kawasan yang sama yang turut mengampu Aksi Pelabuhan berkaitan dengan pencapaian seluruh amanat/*milestones* aksi tersebut.
- 3) Kepala Biro Perencanaan agar menginformasikan data realisasi anggaran program P3KE secara berkala (bulanan) termasuk data level komponen dan subkomponen di aplikasi SAKTI dan memperhatikan substansi laporan realisasi program P3KE dengan menyajikan analisis efektivitas atas pelaksanaan program tersebut.

- 4) Sekretaris Inspektorat Jenderal agar merencanakan program Audit PBJ Elektronik Tahun 2024 dan berkoordinasi dengan BPKP dan LKPP terkait pedoman dan pengembangan sistem audit elektronik dimaksud.
- d. Pemantauan Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) lingkup KKP
- Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretaris Deputy Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian PAN RB Nomor B/82/PW.04/2023, tanggal 17 Juli 2023, perihal kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) Tahun 2023. Pemantauan kepatuhan LHKAN terhadap seluruh unit kerja di lingkup KKP dilaksanakan pada tanggal 24 s.d. 28 Juli 2023 dengan memverifikasi bukti dukung seluruh wajib lapor LHKPN dan non LHKPN.
- Berdasarkan hasil pemantauan dan update sampai dengan 13 Desember 2023 diketahui tingkat kepatuhan LHKAN mencapai 100% terdiri dari 1.483 wajib LHKPN dan 10.991 non wajib LHKPN.
- e. Pemantauan Implementasi Pembangunan Integritas (amanat Permen KP 49 Tahun 2021) pada Biro SDMAO
- Tujuan pemantauan pembangunan integritas sebagaimana Pasal 29 Ayat (2) Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 adalah untuk mengetahui perkembangan, permasalahan, dan upaya perbaikan yang harus dilakukan dalam pembangunan Integritas di Lingkungan KKP. Oleh karena itu telah dilakukan kegiatan dimaksud pada tanggal 24 s.d. 27 Januari 2023 di Biro SDMAO selaku Ketua Komite Pelaksana dalam amanat Permen KP Nomor 49 Tahun 2021.
- Hasil pemantauan diketahui bahwa Biro SDMAO telah melaksanakan fungsi koordinatif terkait ketersediaan SDM dan fasilitasi komunikasi antar unit Eselon I dalam rangka pembahasan awal pembangunan integritas di lingkungan KKP dan telah membentuk Komite Pembangunan Integritas KKP yang ditetapkan dalam Kepmen KP Nomor 81 Tahun 2022, namun belum ditindaklanjuti dengan penyusunan program kerja pembangunan integritas yang selaras dengan *road map* RB KKP dan rencana aksi yang disusun belum seluruhnya terlaksana, antara lain sosialisasi dan penyusunan kebijakan pegawai purna tugas di lingkungan KKP.
- Atas kondisi tersebut, disarankan kepada Kepala Biro SDMAO agar mendorong peran aktif Komite Pembangunan Integritas KKP untuk menyusun dan melaksanakan rencana aksi pembangunan integritas sesuai amanat Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 dan diselaraskan dengan *road map* RB KKP.

### 3. Edukasi/Pendidikan Antikorupsi

Program pembangunan integritas lainnya yang dilakukan adalah edukasi antikorupsi kepada pegawai lingkup KKP maupun *stakeholder* KKP, dalam upaya menanamkan nilai integritas pada diri yang ditunjukkan pada perilaku dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari. Upaya tersebut antara lain melalui:

- a. Studi Banding Pembentukan Penyuluh Antikorupsi di Kementerian Keuangan RI  
Kegiatan studi banding pembentukan Penyuluh Antikorupsi dilakukan pada 11 Januari 2023. Tujuan pelaksanaan studi banding adalah untuk memperoleh informasi, pembelajaran, metode dan strategi dalam pembentukan Penyuluh Antikorupsi (PAKSI). Mengingat Kemenkeu telah memiliki 408 PAKSI dan 3 Ahli Pembangun Integritas (API), sedangkan KKP saat itu belum memiliki PAKSI dan API. Berdasarkan hasil studi banding tersebut, saat ini, KKP telah memiliki dua orang Penyuluh Antikorupsi, yaitu satu orang pegawai dari Inspektorat Jenderal dan satu orang pegawai dari BPPSDMKP (BPPP Ambon).
- b. Inisiasi pembentukan agen SPAK (Saya Perempuan Anti Korupsi) di Lingkungan KKP

Inspektorat V selaku inisiator dalam pembentukan Agen SPAK telah mendorong dilakukannya penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Puslatluh, BPPSDMKP dengan Perkumpulan SPAK melalui Dokumen Perjanjian Kerja Sama Nomor 26/BRSDMKP/KKP/PAKS/VI/2023, Nomor 183/PAKS-SPAK/VI/2023 tentang Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (ASN dan Masyarakat) Melalui Program Pembentukan Agen SPAK pada 16 Juni 2023. Saat ini, telah terbentuk 29 Agen SPAK (Saya Perempuan Anti Korupsi) di lingkup KKP Tahun 2023, melalui kegiatan ToT dengan Fasilitator SPAK Indonesia.



- c. Kegiatan Sosialisasi Budaya Integritas dan Antikorupsi  
Sosialisasi Budaya Integritas dan Antikorupsi dilakukan oleh Inspektur V dan Tim Kerja Integritas selama Tahun 2023 yaitu:

- 1) Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (Prestasi) tahun 2023 di Arch Hotel Bogor pada 21 s.d. 22 Februari 2023
  - 2) Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas di BPPA Sukamandi, Jawa Barat pada 12 Juni 2023 dan 17 Juli 2023, serta pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang dilaksanakan secara *blended learning* oleh BPPA Sukamandi Jawa Barat pada 7 September 2023.
  - 3) Edukasi Anti Korupsi Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang diadakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP pada 28 Agustus 2023.
  - 4) Pembukaan Pelatihan Dasar ASN Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata (BUPERTA) Cibubur pada 29 Agustus s.d. 1 September 2023.
  - 5) Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Whistleblowing System (WBS) pada Biro SDMAO pada 8 September 2023.
  - 6) Sosialisasi Antikorupsi dalam Forum Konsultasi Publik di Stasiun PSDKP Belawan pada 24 s.d. 25 Oktober 2023
  - 7) Pembinaan Pegawai Integritas dalam kegiatan Capacity Building Pegawai lingkup Biro SDM Aparatur dan Organisasi pada 27 s.d. 28 Oktober 2023.
  - 8) Sosialisasi Peningkatan Integritas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta pada 24 November 2023.
  - 9) Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Integritas pada Ditjen PDSPKP tanggal 30 November 2023.
- d. Seminar Motivasi: Sinergi Bersama Membangun Keluarga Berintegritas Antikorupsi
- Kegiatan ini dilaksanakan pada 4 Desember 2023 yang merupakan rangkaian dari peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia untuk membangun integritas dan antikorupsi mulai dari lingkup keluarga. Kegiatan diselenggarakan secara *hybrid* didahului dengan pengukuhan 29 agen Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) lingkup KKP oleh Plt. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur SPAK.



e. Pemberian Apresiasi dan Bincang Integritas pada Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA)

Kegiatan dilaksanakan pada puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2023 pada tanggal 11 Desember 2023 di Ballroom Gedung Mina Bahari III, KKP dengan agenda utama pemberian penghargaan oleh Menteri KP sebagai wujud apresiasinya kepada unit kerja KKP yang telah berhasil mewujudkan komitmennya dalam melawan korupsi pada Tahun 2023. Penghargaan tersebut meliputi 14 Unit Kerja berpredikat menuju WBK internal KKP, 3 unit kerja dengan Pengelolaan Pengaduan Terbaik, 3 unit kerja dengan Unit Pengendalian Gratifikasi Terbaik, 43 Unit Kerja Pelayanan Publik Prima, serta 9 Pemenang Lomba Suara Anti Korupsi HAKORDIA Tahun 2023 dari 3 kategori yaitu Film Pendek, Poster dan Cipta Lagu, dengan Tim Juri dari Inspektur dan Auditor Inspektorat Jenderal.



### C. PENGAWASAN PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

Tim Kerja Pengawasan LK dan BMN KKP telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab melaksanakan pengawasan terhadap LK dan BMN pada tingkat KKP. Hasil-hasil pengawasan tersebut perlu dikompilasi dalam suatu laporan berbentuk ikhtisar agar mempermudah Pimpinan Itjen dalam membaca, menelaah, dan mengambil keputusan. Kegiatan utama, permasalahan, saran, dan tindak lanjut dari Tim Kerja Pengawasan LK dan BMN diuraikan secara ringkas dalam tabel berikut.

Tabel 27. Ikhtisar Kegiatan Pengawasan Tim LK dan BMN Tahun 2023

No	Nama Kegiatan Utama dan Lokasi	Permasalahan Utama yang Ditemukan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Reviu atas Laporan Keuangan KKP: a. Tahunan 2022 b. Semester I 2023 c. Triwulan III 2023	<p>a. Aset Tetap sarana dan prasarana Penangkapan Ikan Terukur (PIT) pengadaan TA 2022 pada 20 Satker TP Provinsi lingkup DJPT senilai Rp14.516.670.705,00 belum dihibahkan kepada Pemda yang bersangkutan;</p> <p>b. Aset Tetap Renovasi (ATR) pada GMB II senilai Rp6.306.305.673,00 pengadaan Tahun 2015-2023 pada 2 (dua) Unit Eselon I yaitu Setjen, dan DJ PRL sampai saat ini belum dilakukan serah terima kepada Satker induk pemilik aset tersebut (Kementerian Keuangan)</p> <p>c. Properti Investasi sebagai tindak lanjut Pemeriksaan LK KKP Tahun 2022 yang disampaikan kepada BPK pada 29 Satker dan/atau 4 (empat) Unit Eselon I senilai Rp863.531.099.531,00, namun baru ditindaklanjuti untuk masuk dalam neraca senilai Rp7.502.886.000,00 yaitu pada 1 (satu) Satker yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan</p>	<p>a. Sekretaris DJPT menginstruksikan kepada Satker TP agar mengusulkan hibah peralatan sarana dan prasarana Penangkapan Ikan Terukur (PIT) pengadaan TA 2022;</p> <p>b. Kepala Biro Umum-PBJ berkoordinasi dengan Sekretaris DJ PRL untuk menyerahkan seluruh ATR yang dimiliki oleh Satker lingkup KKP kepada Satker induk aset tersebut</p> <p>c. Kepala Biro Keuangan agar mengoordinasikan tindak lanjut terhadap temuan BMN Properti Investasi.</p>	<p>a. Aset Tetap sarana dan prasarana PIT seluruhnya sudah dihibahkan kepada Pemda yang bersangkutan;</p> <p>b. Sudah dilakukan identifikasi ATR pada GMB II yang akan diserahkan kepada Kementerian Keuangan.</p> <p>c. Telah ditindaklanjuti identifikasi Fisik dan Asersi BMN Properti Investasi pada 22 satker bersama Biro Keuangan dan Unit Eselon I terkait selama bulan Agustus s.d. November 2023, dengan hasil 114 NUP pada 20 satker memenuhi kriteria BMN Properti Investasi, sehingga nilai BMN Properti Investasi dalam neraca per 30 November 2023 naik menjadi Rp529.132.820.425,00.</p>
2	Reviu atas Perencanaan Kebutuhan BMN	Alat Angkutan Darat Bermotor (AADB) dalam RKBMN TA 2025	Kepala Biro Keuangan agar menginstruksikan	Akan ditindaklanjuti dengan instruksi dan tata cara penghitungan SBSK dalam

No	Nama Kegiatan Utama dan Lokasi	Permasalahan Utama yang Ditemukan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	KKP Tahun 2025	<p>sebanyak 110 NUP, dengan skema pemenuhan kebutuhan berupa pembelian dan sewa, dapat disetujui sebagian sebanyak 17 NUP. Adapun rincian yang disetujui yaitu pada PPB-E1 Sekretariat Jenderal sebanyak 15 NUP, PPB-E1 Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) sebanyak 1 (satu) NUP, PPB-E1 Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebanyak 1 (satu) NUP.</p> <p>Hal tersebut disebabkan pengusulan AADB dari satker tidak memperhatikan ketentuan Standar Barang Standar Kebutuhan (SBSK).</p>	kepada seluruh Sekretaris Itjen/Ditjen/Badan agar dalam pegusulan RKBMN AADB harus memperhatikan SBSK.	Petunjuk Teknis RKBMN Tahun 2026.
3	Reviu atas Laporan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) KKP Tahun 2022	Manajemen belum memisahkan <i>Person In Charge (PIC)</i> yang bertanggung jawab untuk melakukan pengisian Tabel A sebagai pemilik risiko, dan PIC yang bertanggung jawab melakukan Penilaian (Tim Penilai) yang melakukan penilaian atas Tabel A, B, C, D, dan E.	Kepala Biro Keuangan agar dalam menyusun Pedoman Teknis PIPK Tahun 2023 harus memperhatikan pemisahan personil penyusun/penerap dan penilai PIPK.	Sudah ditindaklanjuti pada saat penyusunan Pedoman Teknis PIPK Tahun 2023
4	<p>Pemantauan Pengamanan Aset Tetap Tanah.</p> <p>Kegiatan ini dilaksanakan pada BPBAP Takalar, PPN Brondong, dan BLUPPB Karawang,</p>	<p>a. Terdapat 1 (satu) bidang tanah di Maros dengan luas tanah 16.228 m<sup>2</sup> senilai Rp4.800.729.000,00 dengan status bersertifikat Hak Pakai (terbit tahun 1992) atas nama pemerintah RI c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan namun sampai saat ini masih dikuasai masyarakat, dan menjadi tanah sengketa sejak tahun 2012, namun sampai saat ini belum ada penyelesaiannya (BPBAP Takalar)</p> <p>b. BLUPPB Karawang memiliki Aset Tanah</p>	<p>a. Kepala BPBAP Takalar agar berkoordinasi secara tertulis dengan KPKNL Makassar dan Pengadilan Negeri Maros untuk memastikan penyelesaian secara hukum terhadap sengketa tanah yang dikuasai masyarakat;</p> <p>b. Kepala BLUPPB Karawang agar menginstruksikan Kepala Subbagian Umum untuk aktif berkoordinasi secara tertulis dengan BPN</p>	<p>a. Koordinasi sudah dilakukan dengan KPKNL dan BPN Maros, progres terakhir di BPN Maros dengan status terakhir BPN Maros sudah mengirimkan surat ke pemegang sertifikat a.n. Mutiara untuk mengembalikan sertifikat dan kita sudah mendaftarkan ke BPN terkait pembatalan sertifikat a.n. Mutiara yg diterbitkan Kanwil BPN;</p> <p>b. Telah ditindaklanjuti, dengan bukti bahwa telah terdapat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang</p>

No	Nama Kegiatan Utama dan Lokasi	Permasalahan Utama yang Ditemukan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		yang belum bersertifikat dan saat ini sebagian dikuasai oleh masyarakat penggarap plasma TIR, yaitu Aset Tanah dengan Kode Barang 2010201003 NUP 7 seluas 515.190 m <sup>2</sup> senilai Rp26.820.276.000,00.	Karawang untuk mempercepat penyelesaian atas sertifikasi Aset Tanah NUP 7 sebelum Program Sertifikasi Tanah Kementerian Keuangan berakhir.	Nomor 11/HP/BPN-32/15/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang Pemberian Hak Pakai atas Nama Pemerintah Republik Indonesia CQ Kementerian Kelautan dan Perikanan atas tanah di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat atas Tanah Negara seluas 439.159 m <sup>2</sup> . Selisih tanah seluas 76.031 m <sup>2</sup> masih bertahap dalam proses sertifikasi di BPN.
5	Reviu Terhadap Penatausahaan ( <i>Stock Opname</i> dan SOP) Persediaan.  Dilaksanakan pada: PPN Tanjungpandan, PPN Brondong, PPN Sungailiat, Loka Riset SDKP Bungus, PPS Bungus, dan PPN Palabuhanratu	a. Standar Operasional Prosedur (SOP) persediaan belum mengakomodasi tahapan inventarisasi fisik ( <i>stock opname</i> ) persediaan; b. Pelaksanaan <i>stock opname</i> dilakukan hanya di gudang utama, tidak sampai ke unit pengguna barang, dan beberapa satker tidak melakukan <i>stock opname</i> di lapangan, namun hanya mengambil data saldo persediaan dari aplikasi.	Kepala Biro Keuangan agar menginisiasi penyusunan draft Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penatausahaan Persediaan yang di dalamnya mengatur mengenai penyusunan SOP dan tata cara <i>stock opname</i> persediaan	Tindak lanjut telah tuntas. Draft Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penatausahaan Persediaan telah disusun dan dibahas bersama, dan pada tanggal 9 November 2023 telah ditetapkan oleh MKP menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penatausahaan Persediaan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
6	Pendampingan dan Identifikasi Fisik BMN Properti Investasi pada 22 satker untuk TL BMN Properti Investasi senilai Rp863,5 miliar bersama Biro Keuangan dan Eselon I terkait.  Dilaksanakan pada: BBPBAT Sukabumi, BLUPPB Karawang, BPPP Tegal, BPKIL Serang, PPN Brondong, PPN Karangantu, PPN Kejawanana, PPN	Terdapat BMN yang belum dilakukan reklasifikasi ke Aset Properti Investasi karena Kuasa Pengguna Barang (KPB) masing-masing satker belum melakukan: a. Analisis kondisi BMN yang penyajiannya direklasifikasi menjadi Properti Investasi; dan b. Belum memberikan asersi manajemen berupa deklarasi untuk dasar reklasifikasi BMN menjadi Properti Investasi.	Melakukan identifikasi dan pengecekan fisik, dan asersi BMN Properti Investasi selanjutnya dilakukan reklasifikasi dari BMN Aset Tetap ke BMN Properti Investasi.	a. Sebanyak 114 NUP pada 20 satker dengan total nilai perolehan senilai Rp232.521.704.658,00 telah diidentifikasi dan dilakukan pengecekan fisik BMN memenuhi kriteria Properti Investasi dan telah direklasifikasi ke akun Properti Investasi dengan bukti dukung berupa Berita Acara Inventarisasi BMN dan Asersi Manajemen terhadap BMN Properti Investasi. b. Terdapat 13 NUP dari 9 satker dengan jumlah total nilai perolehan Rp646.740.629.792,00 yang setelah dilakukan identifikasi dan pengecekan BMN tidak memenuhi kriteria Properti Investasi.

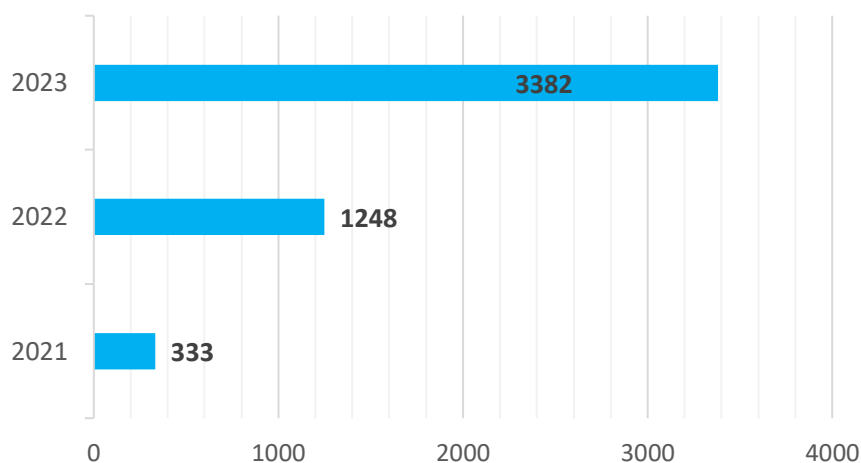


No	Nama Kegiatan Utama dan Lokasi	Permasalahan Utama yang Ditemukan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Pengembangan, PPN Prigi, PPN Sungailiat, PPN Tanjungpandan, PPS Bitung, PPS Cilacap, PPS Kendari, PPS Nizam Zachman Jakarta, PPN Palabuhanratu, Sekretariat DJPDSPKP, PPN Pemangkat, dan BRPBAPP Bogor, dan PPN Sibolga, dan PPN Belawan			c. Nilai BMN Properti Investasi dalam neraca per 30 November 2023 naik menjadi Rp529.132.820.425,00.

#### D. PENGAWASAN DALAM RANGKA PENANGANAN PENGADUAN

Peningkatan jumlah pengaduan menunjukkan bahwa sistem pengelolaan pengaduan telah dipercaya dan diyakini oleh masyarakat/pegawai selaku pengguna layanan bahwa aspirasi/pengaduan yang disampaikan akan direspon dan mendapatkan solusi penyelesaian. Selain itu, peningkatan jumlah pengaduan juga merupakan salah satu indikator bahwa saluran resmi pengaduan semakin dikenal serta kepedulian masyarakat/pegawai akan peningkatan pelayanan publik di suatu instansi semakin baik.

#### Jumlah Pengaduan pada SP4N-LAPOR! Lingkup KKP Tahun 2021-2023



Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik, pada tanggal 29 Maret 2023 Kementerian PAN dan RB telah melakukan monitoring dan evaluasi Pengelolaan SP4N-LAPOR! pada Kementerian dan Lembaga Tahun 2023 dengan hasil salah satunya yaitu KKP memperoleh apresiasi pengelolaan pengaduan terbaik lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan indikator penilaian sebagaimana pada tabel berikut.

K/L dengan Pengelolaan Terbaik			
No	Kemenko	Instansi	Keterangan
1	Kemenko Marves	<b>Kementerian Kelautan dan Perikanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase tindak lanjut mencapai 96% - 100%</li> <li>• Jumlah laporan yang diterima cukup banyak, mencapai 500 hingga 5.000 laporan per-instansi</li> <li>• Kualitas tindak lanjut yang diberikan sesuai substansi penyelesaian</li> <li>• Rata-rata laju tindak lanjut 1-3 hari kerja</li> <li>• Telah Menyusun dokumen Rencana Aksi sesuai Roadmap SP4N</li> </ul>
2	Kemenko Perekonomian	<b>Kemenkop UKM, Kementerian ATR/BPN</b>	
3	Kemenko Polhukam	<b>Kemenkumham</b>	
4	Kemenko PMK	<b>Kementerian Sosial</b>	

Persentase penyelesaian pengaduan menunjukkan komitmen penyelenggara/ pengelola pengaduan dalam menindaklanjuti dan mendokumentasikan setiap pengaduan yang diterima dari masyarakat. Hal ini dapat berkontribusi pada terwujudnya kebijakan pelayanan publik berbasis bukti (*evidence based public services policy*). Dari total 3.382 pengaduan yang diterima lingkup KKP tersebut, pengaduan yang dikelola oleh Admin Kementerian yaitu sebanyak 245 pengaduan

Berdasarkan hasil evaluasi performa dari sistem penanganan pengaduan di lingkungan KKP periode 1 Januari s.d. 26 November 2023 oleh Kementerian PAN dan RB yang disampaikan Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik pada kegiatan *Workshop* dan Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan dan Pengendalian Kecurangan (*Fraud*) di Lingkungan KKP Tahun 2023, diperoleh hasil yaitu:

- a. Laporan pengaduan telah ditindaklanjuti sebesar 99,62% dengan rata-rata kecepatan tindak lanjut yaitu selama 1,2 hari kerja. Perlu diketahui bahwa pada saat itu pengaduan masih dalam penelaahan oleh Admin Kementerian dan saat ini seluruhnya (100%) telah ditindaklanjuti;
- b. Topik laporan terbanyak yang diterima oleh KKP yaitu produk kelautan dan perikanan, perizinan penangkapan dan pengolahan hasil perikanan, serta pencemaran lingkungan laut. Atas topik laporan terbanyak tersebut, organisasi

dapat menelaah mengapa laporan tersebut menjadi pengaduan yang sering dilaporkan dan menjadi acuan dalam menentukan skala prioritas kebutuhan organisasi salah satunya dalam hal perumusan kebijakan;

- c. Pemanfaatan informasi yang didapatkan untuk mencapai tujuan instansi diantaranya: 1) *Branding* instansi ke masyarakat; 2) Laporan berkala kepada pimpinan dan publikasi; serta 3) Dasar perbaikan kebijakan

Output dari kegiatan ini diantaranya kebijakan, SOP, laporan tahunan, dll

Atas hal tersebut, dalam rangka pemanfaatan data pengaduan, Inspektorat V telah melakukan analisa terhadap data pengaduan yang diterima selama Tahun 2023 dengan hasil yaitu beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan instansi dan perbaikan organisasi, antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi terkait standar pelayanan yang lebih intensif ke pengguna layanan baik melalui media *online* maupun *offline*;
- b. Melakukan kegiatan intimisasi (pendekatan) terkait pelayanan dengan seluruh *stakeholder* secara berkala, baik melalui *daring* maupun *luring* (dapat juga melalui pembentukan grup *WhatsApp* dengan *stakeholder*);
- c. Melakukan kegiatan intimisasi (pendekatan) terkait pelayanan dengan seluruh *stakeholder* secara berkala, baik melalui *daring* maupun *luring* (dapat juga melalui pembentukan grup *WhatsApp* dengan *stakeholder*);
- d. Melakukan pembangunan integritas individu/ASN, minimal melalui internalisasi budaya integritas dan kode etik pegawai;
- e. Melakukan pembangunan integritas organisasi, minimal melalui pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di seluruh unit kerja penyelenggara pelayanan publik; dan;
- f. Membangun sistem anti korupsi, minimal melalui implementasi kebijakan pengelolaan pengaduan, pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, sistem pengendalian kecurangan/fraud, dan pelaporan LHKPN/LHKASN.



## **BAB 5 PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Inspektorat V tahun 2023 antara lain:

1. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja melalui aplikasi manajemen kinerja KKP (*kinerjaku.kkp.go.id*), dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Inspektorat V KKP tahun 2023 cukup memuaskan. Hal ini ditunjukkan dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) atau nilai rata-rata kinerja organisasi yang mencapai 106,56%.
2. Nilai kinerja organisasi merupakan rata-rata capaian dua Sasaran Strategis Inspektorat V yang diukur keberhasilannya dengan 16 IKU. Dari 16 IKU tersebut, sebanyak 11 IKU dapat dicapai melebihi target dan 5 IKU sesuai dengan target yang ditetapkan.
3. Beberapa capaian kinerja Inspektorat V Itjen KKP yang meraih capaian positif dalam mendukung kinerja KKP antara lain:
  - a. Temuan materialitas oleh pengawas eksternal sebesar 0,00% dari total realisasi anggaran Itjen KKP;
  - b. Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) KKP mendapat Level 3 (Terdefinisi);
  - c. Sistem Akuntabilitas Kinerja KKP dapat dipertahankan dengan nilai 81,89; dan
  - d. Nilai Integritas KKP mendapat nilai 80,32.
4. Dari sisi kinerja keuangan, realisasi anggaran Inspektorat V TA 2023 yaitu Rp4.450.029.973 atau 99,99% dari alokasi anggaran Rp4.450.229.000. Realisasi tersebut dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja Inspektorat V mencapai 106,57%, sehingga penggunaan sumber daya anggaran Inspektorat V cukup efisien karena dengan penggunaan anggaran yang leboh kecil/sedikit dapat menghasikan capaian kinerja yang lebih tinggi.
5. Hasil pengawasan mitra Inspektorat V yang perlu mendapat perhatian terkait antara lain: a) percepatan penyelesaian tindak lanjut atas seluruh saran hasil pengawasan yang telah disampaikan pada periode tersebut; b) penyusunan payung hukum aplikasi SIMWAS; c) Mereviu SOP terkait kearsipan/pengelolaan persuratan dengan memuat substansi terkait hasil pengawasan bersifat rahasia dan pembaruan nomenklatur pelaksana SOP; d) Mereviu kelayakan media penyimpanan kertas kerja pengawasan dan dokumen pendukungnya; e)

- selektif dalam melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, dan halfday) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik negara.
6. Hasil pengawasan pembangunan integritas yang telah dilaksanakan, antara lain:
    - a. Hasil penilaian oleh TPI sebanyak 14 unit kerja telah memenuhi syarat dan dinyatakan lulus meraih predikat WBK dari Menteri KP berdasarkan Kepmen KP Nomor 189 Tahun 2023 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Lingkungan KKP Tahun 2023. Sedangkan sebanyak 4 (empat) unit kerja lainnya dinyatakan tidak lulus karena tidak memenuhi syarat nilai total minimal 75 dan/atau nilai setiap komponen pengungkit minimal 60%.
    - b. Sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2023, capaian jumlah unit kerja berpredikat WBK/WBBM di Lingkungan KKP sebanyak 98 unit kerja atau 50% dari total 196 unit kerja KKP yang terdiri dari 1 (satu) unit kerja mendapat predikat menuju WBBM Nasional dan 13 unit kerja mendapat predikat menuju WBK Nasional serta 84 unit kerja lainnya mendapat predikat menuju WBK Internal dari Menteri KP;
    - c. Capaian kegiatan penilaian tersebut sebanyak 3 (tiga) unit kerja memperoleh penghargaan UPG Terbaik yaitu BBKIPM Makasar, BPPP Ambon dan SKIPM Cirebon, pada puncak peringatan Hari Anti Korupsi seDunia (HAKORDIA) KKP Tahun 2023 pada 11 Desember 2023
    - d. penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Puslatluh, BPPSDMKP dengan Perkumpulan SPAK melalui Dokumen Perjanjian Kerja Sama Nomor 26/BRSDMKP/KKP/PKS/VI/2023, Nomor 183/PKS-SPAK/VI/2023 tentang Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (ASN dan Masyarakat) Melalui Program Pembentukan Agen SPAK pada 16 Juni 2023. Saat ini, telah terbentuk 29 Agen SPAK (Saya Perempuan Anti Korupsi) di lingkup KKP Tahun 2023, melalui kegiatan ToT dengan Fasilitator SPAK Indonesia
    - e. Hasil Survei Penilaian Integritas dilakukan oleh KPK terhadap KKP diperoleh skor 83.1 dari sebanyak 725 responden, sementara terdapat sejumlah 30 responden non-eligible yang tidak dimasukkan ke dalam analisis; dan
    - f. Pelaporan perkembangan pelaksanaan aksi pencegahan korupsi melalui aplikasi JAGA (<https://jaga.id/monitoring>) telah dilaksanakan sampai dengan target B24.

7. Hasil Pengawasan Peningkatan Laporan Keuangan yang telah dilaksanakan, antara lain:
  - a. Telah ditindaklanjuti identifikasi Fisik dan Asersi BMN Properti Investasi pada 22 satker bersama Biro Keuangan dan Unit Eselon I terkait selama bulan Agustus s.d. November 2023, dengan hasil 114 NUP pada 20 satker memenuhi kriteria BMN Properti Investasi, sehingga nilai BMN Properti Investasi dalam neraca per 30 November 2023 naik menjadi Rp529.132.820.425,00;
  - b. Telah ditindaklanjuti, dengan bukti bahwa telah terdapat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang Nomor 11/HP/BPN-32/15/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang Pemberian Hak Pakai atas Nama Pemerintah Republik Indonesia CQ Kementerian Kelautan dan Perikanan atas tanah di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat atas Tanah Negara seluas 439.159 m<sup>2</sup>. Selisih tanah seluas 76.031 m<sup>2</sup> masih bertahap dalam proses sertifikasi di BPN;
  - c. Sebanyak 114 NUP pada 20 satker dengan total nilai perolehan senilai Rp232.521.704.658,00 telah diidentifikasi dan dilakukan pengecekan fisik BMN memenuhi kriteria Properti Investasi dan telah direklasifikasi ke akun Properti Investasi dengan bukti dukung berupa Berita Acara Inventarisasi BMN dan Asersi Manajemen terhadap BMN Properti Investasi;
  - d. Nilai BMN Properti Investasi dalam neraca per 30 November 2023 naik menjadi Rp529.132.820.425,00
8. Hasil pengelolaan pelaporan pengaduan melalui SP4N-LAPOR! dan Whistleblowing System sebanyak 862 telah ditindaklanjuti baik oleh Inspektorat V maupun Tim Penanganan Pengaduan Eselon I dan UPT;
9. Kementerian PAN dan RB telah melakukan monitoring dan evaluasi Pengelolaan SP4N-LAPOR! pada Kementerian dan Lembaga Tahun 2023 dengan hasil salah satunya yaitu KKP memperoleh apresiasi pengelolaan pengaduan terbaik lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

## **B. PERMASALAHAN**

Pada tahun 2023 seluruh target kinerja seluruhnya tercapai, namun terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pengawasan Inspektorat V selama Tahun 2023, antara lain:

1. Kurangnya komitmen pejabat/pegawai dan unit kerja dalam penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil Audit dengan Tujuan Tertentu/Audit Investigasi khususnya temuan yang berdampak keuangan; dan
2. Kurangnya komitmen Pimpinan unit kerja Eselon I dan UPT dalam penerapan kebijakan pembangunan integritas di lingkungan KKP.

### **C. RENCANA PERBAIKAN**

Terhadap beberapa kendala/permasalahan yang ada dan sebagai bentuk perbaikan kedepan, Inspektorat V akan melakukan beberapa langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan kebijakan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi lainnya dalam mendukung pelaksanaan pengawasan;
2. Meningkatkan kualitas hasil penyelesaian tindak lanjut hasil Audit dengan Tujuan tertentu/Audit Investigasi dengan pelaksanaan pemantauan dan penerapan sanksi melalui Audit dengan Tujuan Tertentu atas dugaan kelalaian dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan; dan
3. Meningkatkan pengawasan dan sinergi atas pelaksanaan kebijakan pembangunan integritas di lingkungan KKP dengan penanggungjawab pembangunan integritas KKP yang berada di Biro SDMAO dan Biro HKLN Sekretariat Jenderal.

**LAMPIRAN**  
**MATRIK CAPAIAN RENCANA AKSI IKU INSPEKTORAT V TAHUN 2023**



### Matrik Capaian Rencana Aksi IKU Inspektorat V Tahun 2023

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Kegiatan Pendukung	Target					Realisasi	Prosentase (%)	
					TW I	TW II	TW III	TW IV	Tahunan			
<i>STAKEHOLDERS PERSPECTIVE</i>												
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Mitra Inspektorat V	1. Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat V (%)	≤1	1.	Riviu Terhadap Laporan Keuangan Itjen KKP	1		1		2	2	100
				2.	Riviu Terhadap Laporan Keuangan KKP	1		1	1	3	3	100
				3.	Riviu Terhadap Laporan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2023 pada Itjen				1	1	1	100
				4.	Riviu Terhadap Laporan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2022 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	1				1	1	100
				5.	Riviu Pagu (Indikatif, Definitif) Itjen KKP Tahun Anggaran 2024			1	1	2	2	100
				6.	Pemantauan Pengelolaan Keuangan TA 2022 Keuangan TA 2022 Itjen KKP	1			1	2	1	50
				7.	Pendampingan Pertanggungjawaban Keuangan dan BMN TA 2022 Satker KKP Di Dinas KP Provinsi	4				4	4	100

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Kegiatan Pendukung	Target					Realisasi	Prosentase (%)	
					TW I	TW II	TW III	TW IV	Tahunan			
				8.	Pemantauan Pengamanan Aset Tetap Tanah		3			3	3	100
				9.	Riviu terhadap Penatausahaan Persediaan (Stock Opname dan SOP Persediaan)		3	1		4	6	150
				10.	Reviu terhadap Penatausahaan PNBPNBP				11	11	2	18
				11.	Reviu Rencana Kebutuhan BMN KKP Tahun 2025				1	1	1	100
				12.	Pemantauan PSP dan Penghapusan Lingkup KKP s.d. Tahun 2023				1	1	1	100
				13.	Pemantauan Sertifikat Tanah dan IMB KKP s.d. Tahun 2022				1	1	1	100
		2.	Tingkat Maturitas Implementasi SPI Mitra Inspektorat V (Nilai)	3.1	1.	Evaluasi Maturitas SPIP Itjen KKP Tahun 2023		1		1	1	100
					2.	Evaluasi Implementasi MR Itjen KKP Tahun 2023			1	1	1	100
					3.	Asistensi Penyusunan MR Itjen KKP Tahun 2024			1	1	1	100
					4.	Evaluasi Penyusunan MR Itjen Tahun 2024			1	1	0	0

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Kegiatan Pendukung	Target					Realisasi	Prosentase (%)
					TW I	TW II	TW III	TW IV	Tahunan		
				5. Pendampingan Terhadap Pelaksanaan IACM Pada Inspektorat Jenderal KKP		1			1	1	100
		3. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mitra Inspektorat V (Nilai)	33	1. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1				1	0	0
				2. Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan (Col)	1				1	1	100
				3. Evaluasi Pelayanan Publik pada Itjen KKP			1		1	1	100
				4. Telaah Sejawat Internal		1			1	1	100
				5. Evaluasi Kegiatan Survey Persepsi Pegawai KKP Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen		1			1	0	0
		4. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat V (Nilai)	A (80,5)	1. Evaluasi Implementasi SAKIP Itjen KKP		1			1	1	100
				2. Reviu Laporan Kinerja Tahun 2022	1				1	1	100
		5. Nilai Integritas KKP (Nilai)	76	1. Penilaian Pembangunan Zona Integritas pada Unit Kerja yang akan diusulkan ke Tim Penilai Nasional (Kemen PAN & RB)	26	21			47	45	95.74
				2. Pemantauan Aksi Pencegahan Korupsi (Stranas PK)	1	1	1	1	4	4	100

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Kegiatan Pendukung	Target					Realisasi	Prosentase (%)	
					TW I	TW II	TW III	TW IV	Tahunan			
				3.	Pemantauan atas Pelaporan LHKASN di Lingkungan KKP	1		1		2	2	100
				4.	Pemantauan Terhadap Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) di Lingkungan KKP				5	5	5	100
				5.	Penilaian Unit Kerja Berpredikat WBK Nasional 2 Tahun terakhir				3	3	3	100
				6.	Pendidikan Anti Korupsi (Integrity Goes to Campus)				7	7	0	0
				7.	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK Tahun 2022				1	1	11	1,100
				8.	Penilaian Desk Evaluasi Pembangunan ZI Terhadap Unit Kerja Yang Diusulkan ke TPI Tahun 2023			23		23	0	0
				9.	Penilaian lapangan pembangunan ZI terhadap unit kerja yang diusulkan ke TPI Tahun 2023			23		23	18	78
				10.	Pelaksanaan Pleno Terhadap Satker yang diusulkan mendapat predikat WBK/WBBM oleh TPI			1		1	1	100
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE												

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Kegiatan Pendukung	Target					Realisasi	Prosentase (%)	
					TW I	TW II	TW III	TW IV	Tahunan			
2.	Pengawasan Intern yang Handal pada Mitra Inspektorat V	6. Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat V (%)	81%	1.	Asistensi Pengelolaan BMN Pada Inspektorat Jenderal KKP	1				1	1	100
				2.	Riviu Rencana Kebutuhan BMN Itjen KKP TA 2024			1		1	1	100
				3.	Evaluasi Pemanfaatan BMN Pada Itjen KKP	1				1	1	100
				4.	Penilaian Efektivitas Pengelolaan BMN Pada Itjen KKP				1	1	1	100
		7. Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat V	81%	1.	Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ serta Implementasi Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) TA 2023 Pada Itjen KKP	1	1	1	1	4	4	100
				2.	Asistensi Pelaksanaan PBJ	1				1	1	100
				3.	Evaluasi Pelaksanaan PBJ			1		1	1	100
				4.	Penilaian Efektivitas Pelaksanaan PBJ				1	1	1	100
		8. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja	81%	1.	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern Pada Inspektorat Jenderal KKP	1	1	1	1	4	4	100

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama		Target	Kegiatan Pendukung		Target					Realisasi	Prosentase (%)
							TW I	TW II	TW III	TW IV	Tahunan		
			lingkup Mitra Inspektorat V		2.	Evaluasi Kebijakan Itjen		1		1	2	2	100
		9.	Persentase Jumlah Rekomendasi Pengawasan Tujuan Tertentu yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja KKP	75%	1.	Evaluasi Kepegawaian			1		1	1	100
		2.			Pengumpulan Bahan dan Keterangan/Audit dengan Tujuan Tertentu/Audit Investigasi	4	6	8	7	25	30	120	
		3.			Pemantauan Tindak Lanjut Hasil ATT/Audit Investigasi	4	4	4	4	16	14	88	
		10.	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti Lingkup KKP	100%	1.	Respon atas penyampaian pengaduan masyarakat oleh Admin Kementerian dan TPP Kementerian	1	1	1	1	4	4	100
		2.			Pemantauan Penanganan Pengaduan di Lingkungan KKP				5	5	6	120	
		11.	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat V (rekomendasi)	2	1.	Kajian atas Kebijakan pada Inspektorat Jenderal				2	2	2	100
		12.	Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan	88%	1.	Evaluasi Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan		1		1	2	2	100

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama		Target	Kegiatan Pendukung		Target					Realisasi	Prosentase (%)
							TW I	TW II	TW III	TW IV	Tahunan		
			Lingkup Inspektorat V		2.	Pemantauan Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP		1			1	1	100
		13.	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat V	80%	1.	Evaluasi terhadap Kepatuhan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2022		1		1	2	2	100
<i>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</i>													
3.	Dukungan Manajemen Pengawasan yang Handal lingkup Inspektorat V	14.	Tingkat Kepatuhan Terhadap Penganggaran dan pengelolaan Kinerja Lingkup Inspektorat V	100%	1.	Pemantauan Realisasi Keuangan dan Kinerja Lingkup Inspektorat V	1	1	1	1	4	4	100
		15.	Terkelolanya Anggaran Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat V	100%	1.	Pemantauan pengelolaan anggaran pada Inspektorat V	1	1	1	1	4	4	100

### PENJELASAN KEGIATAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN DALAM RENCANA AKSI IKU INSPEKTORAT V TAHUN 2023

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Kegiatan Pendukung	Target	Realisasi	Keterangan
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Mitra Inspektorat V	1. Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat V (%)	≤1	1. Pemantauan Pengelolaan Keuangan TA 2022 Keuangan TA 2022 Itjen KKP	2	1	1 kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan bersamaan dengan pemeriksaan BPK
				2. Rivi terhadap Penatausahaan Persediaan (Stock Opname dan SOP Persediaan)	4	6	2 kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan perubahan prioritas pengawasan dan alokasi anggaran

No	Sasaran Program		Indikator Kinerja Utama	Target		Kegiatan Pendukung	Target	Realisasi	Keterangan
					3.	Reviu terhadap Penatausahaan PNB	11	2	9 kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan perubahan prioritas pengawasan dan alokasi anggaran
		2.	Tingkat Maturitas Implementasi SPI Mitra Inspektorat V (Nilai)	3.1	1.	Evaluasi Penyusunan MR Itjen Tahun 2024	1	0	1 kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan mitra belum menyusun MR Tahun 2024
		3.	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mitra Inspektorat V (Nilai)	33	1.	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1	0	1 kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan adanya perubahan kebijakan dari Kementerian PAN dan RB
					2.	Evaluasi Kegiatan Survey Persepsi Pegawai KKP Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen	1	0	1 kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan adanya perubahan prioritas kegiatan mitra
		4.	Nilai Integritas KKP (Nilai)	76	1.	Penilaian Pembangunan Zona Integritas pada Unit Kerja yang akan diusulkan ke Tim Penilai Nasional (Kemen PAN & RB)	47	45	2 kegiatan tidak dilaksanakan tidak dilaksanakan dikarenakan unit kerja dimaksud tidak memenuhi syarat untuk diusulkan ke TPN
					2.	Pendidikan Anti Korupsi (Integrity Goes to Campus)	7	0	7 kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan perubahan kegiatan menjadi e-learning Pembangunan integritas seluruh pegawai KKP
					3.	Penilaian Desk Evaluasi Pembangunan ZI Terhadap Unit Kerja Yang Diusulkan ke TPI Tahun 2023	23	0	23 kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan keterbatasan waktu dan perubahan strategi penilaian yang langsung menggabungkan desk evaluasi dengan peninjauan lapangan
					4.	Penilaian lapangan pembangunan ZI terhadap unit kerja yang diusulkan ke TPI Tahun 2023	23	18	5 kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan unit kerja tersebut tidak masuk kriteria untuk dinilai TPI
2.	Pengawasan Intern yang Handal pada Mitra Inspektorat V	1.	Persentase Jumlah Rekomendasi Pengawasan Tujuan Tertentu yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja KKP	75%	1.	Pengumpulan Bahan dan Keterangan/Audit dengan Tujuan Tertentu/Audit Investigasi	25	30	5 kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan kegiatan tersebut berdasarkan pengaduan masuk dan bersifat tentative
					2.	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil ATT/Audit Investigasi	16	14	2 kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan adanya penggabungan lokasi di satker pusat



No	Sasaran Program		Indikator Kinerja Utama	Target		Kegiatan Pendukung	Target	Realisasi	Keterangan
		2.	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti Lingkup KKP	100%	1.	Pemantauan Penanganan Pengaduan di Lingkungan KKP	5	6	1 kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan satker tidak memenuhi kriteria untuk dipantau sebagai unit terbaik dalam pengelolaan pengaduan